



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD)  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005 - 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**





## **PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 01 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi dan misi daerah, visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 SERI D Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005-2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.

## BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi, arah dan tahapan pembangunan.

### Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2005 – 2025.

### Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2010 dinyatakan masih tetap berlaku

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

DISETUJUI :  
Dengan Keputusan DPRD Kabupaten  
Purbalingga,  
Nomor : 170-03 Tahun 2009 Tanggal 29-6-2009  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Purbalingga  
Ketua

Cap ttd

TASDI, SH

Disahkan di Purbalingga  
pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI PURBALINGGA,

Cap ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga,  
Nomor 1 Tanggal 30 Juni 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA



SUBENO



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka pajang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi belum masuk ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, maka Kabupaten Purbalingga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (2005 – 2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun kedepan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005 – 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Purbalingga.



Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkanya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas





**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**NOMOR : 01 - 2009**  
**TANGGAL : 29 Juni 2009**



## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG .....	1
I.2 PENGERTIAN.....	2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
I.4 LANDASAN.....	2
I.5 HUBUNGAN RPJP DENGAN DOKUMEN LAINNYA.....	5
I.6 SISTEMATIKA .....	6

### BAB II KONDISI UMUM

II.1 KONDISI SAAT INI .....	7
II.1.1 Pemerintahan dan Aparatur.....	8
II.1.2 Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban .....	9
II.1.3 Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama .....	10
II.1.3.1. Pendidikan .....	10
II.1.3.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ..	13
II.1.3.3. Kepemudaan dan Olahraga.....	13
II.1.3.4. Kesehatan.....	14
II.1.3.5. Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	16
II.1.3.6. Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial .....	17
II.1.3.7. Budaya dan Kehidupan Beragama .....	18
II.1.3.8. Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	20
II.1.4 Ekonomi .....	21
II.1.4.1 Kondisi dan Struktur Ekonomi .....	21
II.1.4.2 Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM).....	22
II.1.4.3 Industri.....	23
II.1.4.4 Penanaman Modal .....	23



II.1.4.5 Perdagangan.....	24
II.1.4.6 Pariwisata.....	24
II.1.4.7 Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .....	25
II.1.4.8 Pertanian .....	27
II.1.4.9 Ketahanan Pangan .....	29
II.1.5 Sarana dan Prasarana.....	30
II.1.5.1. Perhubungan.....	30
II.1.5.2. Perumahan dan Permukiman .....	31
II.1.5.3. Sumber Daya Air .....	32
II.1.5.4. Energi .....	33
II.1.5.5. Telekomunikasi.....	34
II.1.6 Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan .....	34
II.1.6.1. Wilayah .....	34
II.1.6.2. Tata Ruang .....	36
II.1.6.3. Pertanahan.....	37
II.1.7 Sumber Daya dan Alam Lingkungan Hidup.....	37
II.2 TANTANGAN.....	40
II.2.1 Pemerintahan dan Aparatur.....	41
II.2.2 Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban .....	43
II.2.3 Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama .....	45
II.1.3.1. Pendidikan .....	45
II.1.3.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	46
II.1.3.3. Kepemudaan dan Olahraga.....	47
II.1.3.4. Kesehatan.....	48
II.1.3.5. Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	49
II.1.3.6. Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial.....	49
II.1.3.7. Kebudayaan dan Kehidupan Beragama.....	51
II.1.3.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	52
II.2.4 Ekonomi .....	53



II.2.5 Sarana dan Prasarana.....	56
II.2.6 Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan .....	59
II.2.7 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	60
II.3 MODAL DASAR.....	62
 <b>BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005-2025</b>	
III.1 VISI .....	63
III.2 MISI .....	64
 <b>BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005-2025</b>	
IV.1 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN .....	67
IV.1.1. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik, .....	67
IV.1.2. Terwujudnya Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berlandaskan Hukum .....	68
IV.1.3. Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri, dan Semangat Nasionalisme .....	68
IV.1.4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkatkan dan Berkeadilan .....	69
IV.1.5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah .....	70
IV.1.6. Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, .....	70
IV.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025 .....	71
IV.1.1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik .....	71
IV.1.2. Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berlandaskan Hukum .....	72
IV.1.3. Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri, dan Semangat Nasionalisme .....	73



IV.1.4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan .....	76
IV.1.5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah .....	78
IV.1.6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup .....	80
IV.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025 .....	82
IV.3.1 RPJMD I (Tahun 2005-2009) .....	82
IV.3.2 RPJMD II (Tahun 2010-2014) .....	88
IV.3.3 RPJMD III (Tahun 2015-2019).....	95
IV.3.4 RPJMD IV (Tahun 2020-2024).....	102

## **BAB V PENUTUP**

### **MATRIK ARAH DAN TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PURBALINGGA 2005-2025**



LAMPIRAN      PERATURAN DAERAH KAB. PURBALINGGA  
NOMOR                      : 01 - 2009  
TANGGAL                    : 29 Juni 2009

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan proses transformasi sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya tantangan dan permasalahan pembangunan akibat dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya pembangunan yang memadai, mengharuskan upaya pembangunan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan maksud agar setiap kegiatan pembangunan memiliki benang merah dan memberi kontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan merupakan panduan yang harus mampu memberi arah bagi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, akan dapat dicapai sasaran jangka pendek dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah, yang kemudian secara bertahap dalam jangka panjang akan mengarah pada terwujudnya visi pembangunan. Agar pembangunan benar-benar dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, dokumen perencanaan pembangunan disusun sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pembangunan.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (lima tahunan), dan jangka pendek (tahunan). Untuk mewujudkan sinergitas secara vertikal demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025 disusun dengan menyelaraskan pada RPJP Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu (1). melindungi segenap bangsa Indonesia dan



seluruh tumpah darah Indonesia; (2). memajukan kesejahteraan umum; (3). mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4). ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, RPJP Kabupaten Purbalingga memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam jangka panjang.

## I.2 PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk masa 20 tahun ke depan, mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

## I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu 20 tahun ke depan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak lain dalam mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan oleh setiap pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi dalam satu pola sikap dan pola tindak.

## I.4 LANDASAN

Landasan idiil RPJP Kabupaten Purbalingga adalah Pancasila dan landasan konstitusional yang mendasari penyusunan RPJP Kabupaten Purbalingga adalah Undang-undang Dasar 1945 dengan mengacu pada RPJP Nasional. Landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah



Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 SERI D Nomor 12);

#### I.5 HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) secara holistik harus mampu menjadi panduan dan memberi arah bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga dalam jangka panjang yang mencakup seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta seluruh penduduk dan seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Sementara itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa tujuan perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Sedangkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa RTRW harus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, RPJPD Kabupaten Purbalingga secara substantif tidak berdiri sendiri. Dokumen RPJPD ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya, baik yang bersifat perencanaan program pembangunan (aspatial) maupun yang bersifat keruangan (spatial) pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. RPJPD Kabupaten Purbalingga disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten Purbalingga. Mengingat Kabupaten Purbalingga secara administratif dan geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang, Banyumas, dan Banjarnegara, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan RTRW Kabupaten Pemalang, Banyumas dan Banjarnegara.



Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, RPJPD akan dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

## **I.6 SISTEMATIKA**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan**
- Bab II : Kondisi Umum**
- Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025**
- Bab IV : Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 –2025**
- Bab V : Penutup.**



## **BAB II**

### **KONDISI UMUM**

#### **II.1 KONDISI SAAT INI**

Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan serta adanya pergeseran standar mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan, menyebabkan upaya pembangunan harus merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Proses pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang berlangsung selama ini, selain telah menghasilkan kemajuan, juga masih menyisakan berbagai permasalahan, baik yang mendasar maupun yang diakibatkan dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan lingkungan eksternal maupun internal ini menyebabkan perubahan standar indikator keberhasilan pembangunan serta meningkatnya kompleksitas permasalahan dan kebutuhan pembangunan.

Kondisi Kabupaten Purbalingga pada saat ini yang mencerminkan kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2000 IPM Kabupaten Purbalingga sebesar 64,9 dan berada pada peringkat 33 dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2003 IPM Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan menjadi sebesar 65,9 dan berada pada peringkat 16 Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2004 IPM Kabupaten Purbalingga kembali mengalami peningkatan menjadi 67 dan menempati peringkat ke-15 di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai IPM Kabupaten Purbalingga yang sebesar 67 pada tahun 2004 merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 68,7 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang baru mencapai 6,4 tahun, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebesar Rp. 586.600,-.

Kondisi Kabupaten Purbalingga saat ini, yang mencerminkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai serta menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di masa mendatang antara lain adalah sebagai berikut :



### II.1.1 Pemerintahan dan Aparatur

1. Otonomi telah memunculkan sikap percaya diri perangkat daerah untuk menciptakan kreativitas, inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan; tumbuhnya kemampuan untuk merumuskan kebijakan (*policy*) dan pengambilan keputusan secara lebih tepat, cepat dan sesuai kebutuhan daerah; tumbuhnya upaya untuk memberikan pelayanan secara lebih baik/prima kepada masyarakat dan upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan lokal yang bersifat mendesak secara lebih cepat; serta semakin terdorongnya kehidupan sosial budaya masyarakat, ekonomi kerakyatan dan kehidupan demokrasi. Dampak nyata dari penerapan otonomi daerah di Kabupaten Purbalingga antara lain adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan publik serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Kondisi umum pemerintahan dan aparatur di Kabupaten Purbalingga antara lain:
  - a. Kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa masih perlu dilakukan penyesuaian secara terus menerus sejalan dengan dinamika lingkungan, kebutuhan, dan peraturan perundang-undangan.
  - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum secara optimal menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
  - c. Kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan. Dari jumlah PNS sebanyak 8.876 orang, 381 orang berpendidikan SD; 407 orang berpendidikan SMP; 2.097 orang berpendidikan SLTA; 169 orang berpendidikan D1; 2.844 orang berpendidikan D2; 704 orang berpendidikan D3; 12 orang berpendidikan D4; 2.177 orang berpendidikan Strata 1; dan 85 orang berpendidikan Strata 2.
  - d. Ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum masih relatif kurang.



## II.1.2 Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban

1. Di tengah semakin derasya arus penetrasi budaya global dan semakin berkembangnya individualisme, materialisme, dan hedonisme yang mengabaikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kejujuran, kurangnya perhatian terhadap pembangunan kebudayaan dan pembinaan serta pengembangan nilai-nilai nasionalisme, terutama pada kalangan generasi muda, telah menyebabkan semakin melemahnya semangat nasionalisme serta menurunnya kesadaran sosial dan semangat kesetiakawanan sosial.
2. Adanya indikasi kerawanan sosial yang muncul dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban umum, menunjukkan belum berkembangnya budaya hukum.

Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akan mengganggu dan mengurangi intensitas aktivitas sosial ekonomi dalam masyarakat sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Pada tahun 2004 angka kriminalitas di Kabupaten Purbalinga sebanyak 106 kasus yang terdiri dari pencurian sebanyak 96 kasus, perampokan sebanyak 7 kasus, pembunuhan sebanyak 3 kasus dan pertikaian antar kelompok masyarakat sebanyak 4 kasus. Sementara itu jumlah kejadian unjuk rasa politik sebanyak 13 kasus dan unjuk rasa terkait masalah ekonomi sebanyak 4 kasus. Sedangkan jumlah pelanggaran hukum pidana sebanyak 151 kasus, kecelakaan lalu lintas sebanyak 11 kasus, dan jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.298 kasus.

3. Proses demokratisasi yang telah berlangsung seiring dengan bergulirnya reformasi politik telah membawa perubahan mendasar terhadap kehidupan politik. Terbukanya kran demokrasi telah memungkinkan partisipasi politik rakyat yang semakin besar dalam segala jenjang. Namun demikian, berkembangnya kehidupan demokrasi belum diikuti dengan etika dan kedewasaan berpolitik. Demokrasi baru dimaknai sekadar sebagai kebebasan mengaktualisasikan dan mengartikulasikan pendapat, gagasan, dan aspirasi. Euforia politik di tengah irasionalitas politik dan kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap etika politik sangat rawan menimbulkan friksi dan konflik.



Kesadaran politik rakyat antara lain dapat diukur dari tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan umum (Pemilu). Tingkat partisipasi rakyat di Kabupaten Purbalingga dalam Pemilu tahun 2004 sebesar 84,3 persen. Peta politik Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari keterwakilan Partai Politik di lembaga legislatif di mana 17 kursi diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 10 kursi diperoleh Partai Golongan Karya (Golkar), 3 kursi diperoleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 6 kursi diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 6 kursi diperoleh Partai Amanat Nasional (PAN), 1 kursi diperoleh Partai Keadilan (PKS), dan 2 kursi diperoleh Partai Demokrat (PD).

### II.1.3 Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama

#### II.1.3.1. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2003 mencapai 102,60 persen, dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 117,76 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 5,16 persen. APK SMP/MTs pada tahun 2003 sebesar 79,12 persen, dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 92,17 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 13,05 persen. Adapun APK SMA/MA/SMK pada tahun 2003 sebesar 32,62 persen dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 32,94 persen.
2. Pada tahun 2003 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Purbalingga adalah 6,1 tahun dan meningkat menjadi 6,3 tahun pada tahun 2004. Angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2003 sebesar 90,5 persen dan pada tahun 2004 naik menjadi 92,4 persen.
3. Salah satu permasalahan menonjol di bidang pendidikan adalah masih adanya kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antarkelompok masyarakat. Data Susenas 2003 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama (75,7 persen) anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik



karena tidak memiliki biaya sekolah (67,0 persen) maupun karena harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Pada tahun 2003, pada saat angka partisipasi sekolah (APS) penduduk 13-15 tahun 20 persen penduduk terkaya sudah mencapai 93,98 persen, APS kelompok 20 persen penduduk termiskin baru mencapai 67,23 persen. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan APS penduduk termiskin dan terkaya berturut-turut sebesar 28,52 persen dan 75,62 persen. Pada saat yang sama, partisipasi pendidikan penduduk perdesaan lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan. Rata-rata APS penduduk perdesaan usia 13-15 tahun pada tahun 2003 adalah sebesar 75,6 persen, sementara APS penduduk perkotaan untuk kelompok usia yang sama sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan yang lebih nyata terlihat untuk kelompok usia 16-18 tahun, yaitu APS penduduk perkotaan sebesar 66,7 persen dan APS penduduk perdesaan sebesar 38,9 persen atau hanya separuh APS penduduk perkotaan.

4. Masih relatif rendahnya APS terutama pada jenjang pendidikan SLTP dan yang lebih tinggi, serta masih adanya kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antarkelompok masyarakat, menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi anak-anak keluarga kurang mampu dan bagi penduduk di wilayah perdesaan perlu terus ditingkatkan.
5. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, juga belum tersedia secara memadai.
6. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan, terbatasnya kompetensi dan



profesionalisme tenaga pendidik, serta belum efektif dan efisiennya manajemen pendidikan, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan relatif rendahnya kualitas pendidikan.

Pada tahun 2004 terdapat 62,52 persen gedung SD/MI dan 12,07 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar-mengajar, juga berdampak pada kurangnya motivasi siswa untuk sekolah. Pada saat yang sama, masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran.

Dilihat dari kualitas tenaga pendidik, belum semua pendidik memiliki kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Proporsi guru SD berpendidikan Diploma-2 ke atas sebesar 83,28 persen dan proporsi guru SLTP berpendidikan Diploma-3 ke atas sebesar 84,40 persen. Kondisi tersebut belum mencukupi untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

7. Hal lain yang terkait dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan adalah manajemen pendidikan yang belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pembangunan pendidikan sejak dalam penyusunan rencana, penentuan prioritas program, hingga mobilisasi sumber daya untuk merealisasikan rencana. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah pula dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberikan wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.
8. Belum terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) yang seharusnya ditetapkan oleh daerah dengan acuan umum dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, menjadi penyebab belum



optimalnya desentralisasi pendidikan. Di samping itu, efektivitas peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih belum optimal.

#### II.1.3.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pembangunan dalam bidang sosial maupun ekonomi terutama pada tataran praktis di masyarakat masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya diseminasi dan difusi teknologi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga riset.

#### II.1.3.3. Kepemudaan dan Olahraga

1. Kecenderungan meningkatnya angka kenakalan remaja dan meningkatnya kecenderungan perilaku negatif yang dilakukan oleh anak-anak muda seperti konsumsi minuman keras dan narkoba, pencurian, perampokan, dan tindak kekerasan lainnya, menunjukkan adanya sesuatu yang luput dari perhatian dalam proses pembangunan selama ini. Gejala lain yang semakin kasat mata dalam kehidupan generasi muda adalah melunturnya semangat kebangsaan dan cinta Tanah Air serta melunturnya apresiasi terhadap budaya bangsa dan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya.
2. Kondisi keolahragaan baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Secara umum, prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga masih belum menggembirakan. Dari sisi ketersediaan prasarana, sampai tahun 2004 Kabupaten Purbalingga belum memiliki gelanggang olahraga berstandar nasional. Ketersediaan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 antara lain : 1 unit stadion olahraga, 240 lapangan sepak bola, 31 unit lapangan tenis



terbuka dan 2 unit lapangan tenis tertutup, 152 lapangan bulu tangkis, dan 3 unit kolam renang.

#### II.1.3.4. Kesehatan

1. Status kesehatan masyarakat Kabupaten Purbalingga semakin meningkat yang ditandai dengan naiknya usia harapan hidup dari 68,0 tahun pada 2003 menjadi 68,5 tahun pada 2004. Dilihat dari indikator angka kematian ibu melahirkan (AKI), terjadi penurunan AKI yang sangat signifikan. Pada tahun 2003 AKI Kabupaten Purbalingga sebesar 82 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2004 turun menjadi 55 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan angka nasional yang baru menargetkan AKI sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Angka kematian bayi (AKB) Kabupaten Purbalingga tahun 2003 sebesar 7,7 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding target nasional pada tahun 2009 yaitu sebesar 25 per 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2003 sebesar 10,45 persen, dan turun menjadi 10 persen pada tahun 2004; sedangkan target nasional pada tahun 2009 sebesar 20 persen.
2. Pengeluaran untuk kebutuhan pemeliharaan kesehatan pada saat ini menempati urutan keenam dari delapan jenis pengeluaran non-makanan (Susenas, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan ekonomi dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah.
3. Kondisi prasarana, sarana, dan tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2004 di Kabupaten Purbalingga terdapat 1 (satu) unit



rumah sakit umum pemerintah tipe C, 2 (dua) unit rumah sakit umum swasta tipe D, dan 109 unit klinik/praktik dokter. Tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 terdiri dari 23 orang dokter umum, 8 (delapan) dokter spesialis, 14 orang dokter gigi, 134 orang perawat, 170 orang bidan, dan 2 (dua) orang ahli gizi.

4. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih banyaknya kebiasaan merokok di masyarakat. Dari 15 jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Purbalingga, konsumsi tembakau menempati urutan kedua (15,86 persen). Demikian juga upaya menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi masih belum optimal. Pada tahun 2004 cakupan air bersih sebesar 64,27 persen dan cakupan jamban keluarga masih sekitar 50,5 persen. Sedangkan cakupan saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat baru sebesar 64,27 persen.
5. Prevalensi kurang gizi terutama bagi anak dan balita serta ibu hamil di Kabupaten Purbalingga masih relatif tinggi. Prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,7 persen, balita kekurangan energi protein (KEP) sebesar 0,79 persen, dan ibu hamil (bumil) kekurangan energi kronis (KEK) sebesar 5,5 persen.
6. Sampai dengan tahun 2004, cakupan asupan energi dan vitamin kepada balita dan ibu hamil (bumil) cukup tinggi yaitu: distribusi kapsul vitamin A pada balita per Februari sebesar 99 persen dan per Agustus sebesar 98,5 persen, distribusi kapsul vitamin A pada bumil sebesar 90 persen, dan distribusi tablet besi (Fe) pada bumil sebesar 88 persen.
7. Cakupan imunisasi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan angka yang relatif baik. Pada tahun 2004 cakupan *universal children immunization*



(UCI) secara umum cukup tinggi, terdiri dari cakupan imunisasi BCG sebesar 112,18 persen, cakupan imunisasi DPT-1 sebesar 98,73 persen, DPT-3 sebesar 95,37 persen, polio-4 sebesar 94,51 persen, campak sebesar 92,39 persen, dan UCI desa sebesar 70 persen. Untuk cakupan imunisasi bumil yaitu TT-1 bumil sebesar 56,15 persen dan TT-2 bumil sebesar 52,23 persen. Adapun cakupan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), yaitu DT sebesar 98,07 persen dan TT sebesar 94,07persen.

#### II.1.3.5. Kependudukan dan Keluarga Berencana

1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Purbalingga cenderung menunjukkan penurunan. Selama tahun 1990 sampai tahun 2000 LPP sebesar 1,04 persen, sedangkan pada tahun 2003 sebesar 0,85 persen, dan pada tahun 2004 sebesar 0,77 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan program kependudukan di Kabupaten Purbalingga.
2. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2004 sebanyak 871.840 jiwa yang terdiri dari 433.213 laki-laki dan 438.627 perempuan. Jika dilihat dari struktur, penduduk usia 0-14 tahun sebesar 26,0 persen; sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 72,0 persen, dengan *dependency ratio* sebesar 33 %.
3. Dilihat dari sisi kemampuan keluarga, jumlah keluarga yang termasuk kategori Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi di Kabupaten Purbalingga masih cukup tinggi, yaitu 34,05 persen dari total keluarga sebanyak 238.488 KK (Pendataan Keluarga Tahun 2004).
4. Beberapa indikator menunjukkan kualitas pelayanan KB belum sepenuhnya memenuhi harapan, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu efektivitas Program KB. Hal ini terlihat dari angka kepesertaan keluarga berencana aktif (peserta aktif/PA) yang



menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) hanya sebesar 26,78 persen, sedangkan peserta non-MKJP yang sebesar 73,22 persen. Sementara prevalensi pemakaian alat kontrasepsi pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin baru sebesar 76,83 persen.

#### II.1.3.6. Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

1. Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 telah menurunkan aktivitas ekonomi sebesar 24 persen. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sampai jangka waktu yang relatif lama. Bahkan bagi kelompok ekonomi lemah, dampak krisis ekonomi masih dirasakan hingga saat ini. Menurunnya daya beli akibat peningkatan harga berbagai kebutuhan hidup yang sangat drastis tanpa diikuti peningkatan pendapatan secara nyata menyebabkan menurunnya kemampuan sebagian masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dampak tidak langsung dari kondisi ini adalah meningkatnya angka pengangguran dan munculnya berbagai kerawanan sosial, serta meningkatnya angka kriminalitas seperti pencurian, kebingungan dan kekerasan massa, dan sebagainya.

Penurunan daya beli masyarakat secara drastis telah menyebabkan keluarga miskin semakin sulit keluar dari kemiskinannya. Kondisi tersebut bahkan telah memunculkan keluarga miskin baru akibat meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja dan menurunnya kesempatan kerja.

2. Ketidakberdayaan masyarakat dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut mengakibatkan lambannya laju peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini antara lain ditandai dengan masih cukup besarnya jumlah keluarga miskin. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten



Purbalingga pada tahun 2004 sebanyak 80.936 Keluarga (38,71 persen).

3. Di sisi lain, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Purbalingga semakin menurun. Pada tahun 2004 jumlah PMKS Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.095 orang, sedangkan tahun 2003 sebanyak 1.289 orang. Menurunnya jumlah PMKS tidak terlepas dari peran masyarakat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini ditandai oleh semakin meningkatnya jumlah organisasi sosial maupun lembaga sosial yang dikelola oleh masyarakat, seperti panti asuhan dan sebagainya.

#### II.1.3.7. Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Pada saat ini telah terjadi peluruhan nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi penuntun norma dan etika sosial di berbagai bidang kehidupan. Orientasi pembangunan pada masa lalu yang lebih difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan pembangunan bidang sosial budaya, telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, khususnya bagi pembangunan karakter bangsa. Berkembangnya budaya materialisme, konsumerisme, dan hedonisme; berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, karya, dan inovasi; serta meningkatnya tindak kekerasan, premanisme, dan kriminalitas; merupakan akibat kebijakan pembangunan yang mengabaikan pembangunan budaya. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan keramahan semakin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai individualisme dan materialisme. Demikian pula kebanggaan terhadap jati diri bangsa semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing yang dianggap lebih superior. Identitas nasional meluntur oleh cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, sementara nilai positif yang lebih relevan bagi



upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa (*nation and character building*) justru diabaikan. Pembangunan bidang kebudayaan melalui pengembangan seni budaya sebagai media internalisasi nilai-nilai luhur guna mewujudkan harmoni sosial dan membangun karakter bangsa, masih belum optimal.

2. Dalam kehidupan beragama, nilai-nilai agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Kehidupan beragama baru pada tataran ritual belum dalam bentuk pengamalan. Hal ini tercermin pada masih banyaknya perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, meningkatnya angka perceraian, ketidakharmonisan keluarga, pornografi dan pornoaksi, menunjukkan semakin lemahnya sendi-sendi moral masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat yang menyimpang ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pemahaman ajaran agama dengan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan mutu tenaga pendidik, kurang tertatanya kurikulum, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai penjaga moralitas dalam masyarakat yang dinamis.

Pada tahun 2004 jumlah prasarana ibadah di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 840 masjid, 3.471 mushola, 26 gereja Kristen Protestan, 4 (empat) gereja Katolik/kapel, dan 1 (satu) klenteng. Adapun lembaga pendidikan agama



yang ada di Kabupaten Purbalingga berupa 50 pondok pesantren dan 1 (satu) lembaga pendidikan Al Kitab. Sedangkan jumlah jam'ah haji sebanyak 292 orang.

#### II.1.3.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pada tahun 2004, Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measure*) Kabupaten Purbalingga menempati posisi kedua dan Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) menempati posisi ke-35 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Namun demikian, upaya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG) masih perlu terus didorong. Kultur patriarkhi yang memosisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat telah meminggirkan peran perempuan di berbagai bidang. Konstruksi sosial yang tidak adil ini juga menyebabkan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses berbagai sumber daya. Program pembangunan yang sensitif gender perlu dilakukan agar perempuan dapat terlibat aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pemanfaatan hasil pembangunan.
2. Pada tahun 2004 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Purbalingga sebesar 63,5 dengan partisipasi wanita di parlemen sebesar 21,6 persen dan proporsi wanita dalam angkatan kerja sebesar 38,4 persen. Adapun Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purbalingga sebesar 64,7 yang terdiri dari proporsi perempuan / laki-laki (50,6 persen/49,4 persen), usia harapan hidup perempuan / laki-laki (69,5 tahun/65,6 tahun), angka melek huruf perempuan / laki-laki (85,5 persen/92,2 persen), rata-rata lama sekolah perempuan / laki-laki (5,2 tahun/6,0 tahun), dan *sharing* pendapatan perempuan / laki-laki (47,1 persen/52,9 persen).



## II.1.4 Ekonomi

### II.1.4.1 Kondisi dan Struktur Ekonomi

1. Pada kurun waktu sebelum krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga cukup tinggi, rata-rata di atas 6,5 persen per tahun. Pada tahun 1997 ekonomi mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 7,57 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan tersebut mengalami penurunan secara drastis dan terpuruk pada level minus 8,28 persen pada tahun 1998 yang merupakan puncak krisis dengan tingkat inflasi mencapai 54,14 persen. Tingginya inflasi ini secara signifikan berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat yang selanjutnya secara berantai menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi di daerah belum cukup kuat menahan gejolak eksternal, baik nasional maupun global.
2. Sampai dengan tahun 2004, kondisi makro perekonomian Purbalingga semakin membaik. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mencapai 4,18 persen, sedangkan tahun 2000 sebesar 2,78 persen. Produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2004 atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 1.921,654 milyar, meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya mencapai 1.605,464 milyar. Pada tahun 2001 inflasi di Kabupaten Purbalingga tercatat sebesar 18,13 persen, sedangkan pada tahun 2005 hanya sebesar 9,03 persen.
3. Tingkat pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Purbalingga relatif merata tetapi pada tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Hal ini terlihat dari Indeks Gini tahun 2004 yang sebesar 0,2502 dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 2.468.000,-. Sementara angka kemiskinan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun yang sama



menunjukkan angka sebesar 29,95 persen, dimana sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal (75,54 persen).

4. Pergeseran struktur ekonomi tampak jelas dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 1980 lapangan usaha pertanian memberi kontribusi sebesar 54,5 persen terhadap total PDRB. Sementara itu sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 0,6 persen, sektor perdagangan sebesar 15 persen, dan sektor jasa sebesar 3,8 persen. Pada tahun 1990 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurun menjadi 38,3 persen, sementara kontribusi sektor industri dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Tahun 2005 peranan sektor primer, terutama sektor pertanian, terus mengalami penurunan menjadi 35,6 persen. Sektor industri pengolahan sedikit meningkat menjadi 9,78 persen, sedangkan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan yang cukup berarti menjadi 18,25 persen dan sektor jasa meningkat menjadi 16,28 persen.
5. Lambatnya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Purbalingga antara lain disebabkan oleh posisi geografis wilayah yang jauh dari jalur lalu lintas utama di Pulau Jawa, baik jalur utara maupun jalur selatan. Padahal salah satu pertimbangan investor dalam menanamkan investasinya adalah kemudahan transportasi karena aspek ini sangat berpengaruh terhadap biaya produksi.

#### II.1.4.2 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

##### 1. Koperasi

Pada tahun 2003, koperasi yang aktif di Kabupaten Purbalingga sebanyak 129 unit, sedangkan yang tidak aktif sebanyak 35 unit. Jumlah koperasi primer sebanyak 164 unit dan Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 16 unit. Pada tahun 2004 terjadi



penambahan jumlah koperasi aktif sebesar 3,8 persen menjadi 134 unit koperasi dan peningkatan volume usaha sebesar 53,54 persen.

## 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sampai dengan tahun 2004 jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga mencapai 78.963 unit usaha, terdiri dari 78.538 unit usaha mikro dan kecil, serta 425 unit usaha menengah, yang bergerak di berbagai bidang usaha, meliputi usaha perindustrian perdagangan, jasa, dan lain-lain.

### II.1.4.3 Industri

1. Jumlah usaha mikro dan kecil sektor industri di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 tercatat sebanyak 21.563 unit usaha. Sementara jumlah industri menengah sebanyak 15 unit usaha dan industri besar sebanyak 9 unit usaha.
2. Berkembangnya kegiatan sektor industri telah memberikan kontribusi yang nyata dalam penyediaan kesempatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap sektor industri sebanyak 68.942 orang atau sebesar 17,04 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja.

### II.1.4.4 Penanaman Modal

Total nilai investasi di sektor industri pada tahun 2003 sebesar Rp 45.060.198.000,- dan tahun 2004 meningkat menjadi Rp 48.260.784.000,- atau naik sebesar 7,10 persen. Demikian juga nilai produksi mengalami kenaikan dari Rp 356.118.000.000,- pada tahun 2003 menjadi Rp 374.182.000.000,- pada tahun 2004, atau mengalami kenaikan sebesar 5,07 persen. Adapun nilai ekspor mengalami kenaikan dari sebesar US\$ 13.205.752,-,



pada tahun 2003 menjadi US\$ 15.128.482,- pada tahun 2004, atau naik sebesar 14,52 persen.

#### II.1.4.5 Perdagangan dan Jasa

1. Setelah sektor pertanian dan industri, sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, yaitu sebanyak 75.453 orang atau sebesar 19,50 persen.
2. Prasarana perdagangan di Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan. Jumlah pasar pada tahun 2004 sebanyak 41 unit, terdiri dari 3 (tiga) unit pasar swalayan, 34 unit pasar umum, 2 (dua) unit pasar hewan, 1 (satu) unit pasar sepeda, dan 1 (satu) buah pasar ikan. Bila dibandingkan tahun 2003, pasar umum di Kabupaten Purbalingga meningkat sebesar 4,88 persen atau mengalami penambahan sebanyak 2 (dua) unit.
3. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor basis dengan nilai *location quotient* (LQ) rata-rata sebesar 1,09 sedangkan jasa-jasa lainnya dengan nilai LQ sebesar rata-rata 2,15. Sektor jasa termasuk di dalamnya jasa pemerintahan, sosial kemasyarakatan, jasa hiburan, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Berkembangnya jasa pendidikan; jasa kesehatan yang mencakup rumah sakit, rumah sakit bersalin, dokter praktik; jasa hiburan berupa objek wisata yang menjadi salah satu sumber PAD; serta jasa perorangan dan rumah tangga yang mencakup jasa perbengkelan, reparasi, dan pembantu rumah tangga; juga mendorong sektor ini menjadi sektor basis.

#### II.1.4.6 Pariwisata

1. Kondisi alam Kabupaten Purbalingga sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, baik wisata alam maupun buatan. Namun sampai saat ini potensi tersebut belum didayagunakan secara optimal, terlihat belum diadakannya Kabupaten Purbalingga sebagai daerah tujuan wisata di tingkat regional maupun nasional. Hal ini disebabkan



kondisi objek wisata tersebut belum dikelola secara optimal sehingga kurang kompetitif dalam persaingan pasar regional maupun nasional. Hanya beberapa objek wisata yang sudah dikelola dengan baik. Jumlah objek wisata yang ada di Purbalingga pada tahun 2004 sebanyak 10 buah, terdiri atas 4 (empat) objek wisata alam dan 6 (enam) objek wisata buatan. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2004 sebanyak 143.198 orang. Adapun jumlah hotel pada tahun 2004 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 12 unit, dengan jumlah tamu menginap sebanyak 18.154 orang.

2. Sumbangan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar Rp 153.028.000,- meningkat menjadi sebesar Rp. 171.377.870,- pada tahun 2004.

#### II.1.4.7 Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

1. Data Susenas 2003 menunjukkan penduduk usia kerja 10 tahun ke atas sebanyak 682.865 jiwa atau 80,62 persen, terdiri dari angkatan kerja sebanyak 404.477 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 278.388 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2002 sebesar 58,01 persen dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi sebesar 59,23 persen. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 73,64 persen, lebih besar dibanding TPAK perempuan yang hanya sebesar 44,96 persen. TPAK perempuan pada tahun 2003 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2002, yaitu sebesar 42,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan semakin meningkat.
2. Pada tahun 2004 jumlah pengiriman transmigran dari Kabupaten Purbalingga sebanyak 40 keluarga dengan perincian 20 keluarga ke Kalimantan Barat, 10 keluarga ke Kalimantan Timur dan 10 keluarga melalui program transmigrasi mandiri.



3. Berdasarkan lapangan kerja, sektor pertanian masih merupakan lapangan kerja utama bagi penduduk Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2003 proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 37,69 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, angkutan, dan jasa lainnya yang sebanyak 34,87 persen. Sementara penduduk yang bekerja di sektor industri, konstruksi, pertambangan, listrik, dan air sebanyak 27,44 persen dari penduduk yang bekerja. Hal ini mencerminkan adanya dinamika perekonomian Kabupaten Purbalingga di mana peran sektor sekunder dan tersier terus mengalami peningkatan.
4. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian Kabupaten Purbalingga serta berkembangnya sektor-sektor sekunder dan tersier, tingkat pengangguran terbuka juga terus mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga tahun 2002 sebesar 4,95 persen, mengalami penurunan menjadi sebesar 3,66 persen pada tahun 2003, dan kembali mengalami penurunan menjadi 2,55 pada tahun 2004. Tingkat pengangguran terdidik pada tahun 2004 sebesar 12,53 persen, menurun dari tahun sebelumnya yakni 17,88 persen.
5. Pada tahun 2003 penduduk pencari kerja di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh penduduk usia muda (kurang dari 25 tahun), yaitu sebanyak 67,42 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 37 persen pencari kerja di Kabupaten Purbalingga tamat SD, 15,75 persen tamat SLTP, dan 8,85 persen tamat SLTA. Adapun pencari kerja tamatan perguruan tinggi hanya sebesar 2,27 persen.
6. Tumbuhnya ekonomi Kabupaten Purbalingga, khususnya pada sektor-sektor sekunder dan tersier, telah memperluas kesempatan kerja. Pada tahun 2003 tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Purbalingga sebesar 96,34 persen, meningkat dari tahun 2002 yakni sebesar 95,05 persen.



#### II.1.4.8 Pertanian

1. Pemulihan kinerja perekonomian daerah pasca krisis membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai PDRB harga konstan tahun 2003 yang baru mencapai level yang sama dengan tahun 1997. Relatif lamanya pemulihan ekonomi di Kabupaten Purbalingga bisa jadi disebabkan oleh dominasi sektor primer (pertanian) dalam struktur perekonomian daerah, padahal tingkat produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian relatif rendah. Di sisi lain, sebagian besar produk pertanian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input antara bagi sektor-sektor terkait lainnya (*backward and foreward linkages*) sehingga efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya relatif kecil.
2. Relatif rendahnya produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian antara lain disebabkan usaha pertanian pada umumnya masih dikelola dengan teknologi yang belum optimal. Akibatnya jenis, kualitas, dan kapasitas produk pertanian pada umumnya belum mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar. Sementara lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang merupakan sektor sekunder dan tertier belum mampu secara signifikan menggeser dominasi sektor primer dalam rangka mendongkrak dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Berdasarkan analisis *location quotient* (LQ), sektor pertanian tanaman pangan merupakan sektor basis. Selama tahun 2001-2005, nilai LQ sektor pertanian tanaman pangan rata-rata sebesar 1,57. Artinya, sektor pertanian tanaman pangan dapat memenuhi kebutuhan daerah dan mampu mengeksport produksinya ke luar daerah. Hal tersebut diperkuat dengan kemampuan Kabupaten Purbalingga untuk berswasembada pangan, khususnya beras, sehingga terjadi surplus sekitar 35 ribu ton dalam tahun 2004.
4. Sementara itu, berdasarkan analisis *dynamic location quotient* (DLQ) selama lima tahun, sektor



pertanian menunjukkan nilai kurang dari satu (0,872), berarti terdapat kecenderungan semakin berkurangnya peran sektor pertanian. Dengan demikian, ke depan sektor pertanian yang semula merupakan sektor basis bisa jadi akan menjadi sektor non-basis. Sebaliknya, sektor industri memiliki DLQ sebesar 15,34 yang berarti bahwa sektor ini memiliki kecenderungan terus berkembang. Kecenderungan ini cukup positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Purbalingga.

5. Sub sektor peternakan juga merupakan sektor basis yang mampu mencukupi kebutuhan daerah dan sekaligus mampu mengeksport produknya ke daerah lain. Hal ini didukung dengan peningkatan populasi dan produksi beberapa jenis ternak.
6. Pada tahun 2004, luas lahan persawahan beririgasi seluas 18.161 hektar dan sawah tadah hujan seluas 4.051 hektar. Dengan luas areal tanam padi sebesar 32.182 hektar dapat menghasilkan gabah sebanyak 211.338 ton, atau setara beras sebanyak 113.191 ton dengan produktivitas sebesar 65,7 kwintal/hektar Gabah Kering Panen (GKP).
7. Produksi jagung pada tahun 2004 sebanyak 31.304 ton dari areal tanam seluas 7.038 hektar dengan nilai produktivitas sebesar 4,45 ton/hektar. Dengan jumlah konsumsi jagung hanya sebesar 1.345 ton/tahun maka surplus produksi jagung cukup besar. Namun untuk kebutuhan kedelai masih belum tercukupi. Jumlah konsumsi kedelai sebesar 9.242 ton/tahun baru bisa dipenuhi sebesar 744 ton.
8. Produktivitas budidaya singkong di Kabupaten Purbalingga sebesar 26,51 ton/hektar. Dengan areal tanam seluas 9.622 hektar dapat dihasilkan singkong sebanyak 255.044 ton. Dibandingkan dengan jumlah konsumsi singkong sebesar 54.663 ton/tahun, maka terdapat surplus sebesar 201.381 ton/tahun.



9. Luas areal tanam dan produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Purbalingga tahun 2004 adalah sebagai berikut: kelapa dengan luas areal 12.113 hektar dan produktivitas 1,02 ton/hektar; kelapa deres dengan luas areal 5.301 hektar dan produktivitas gula merah 9,98 ton/hektar; serta kopi dengan luas areal 1.231 hektar dan produktivitas 0,45 ton/hektar. Tanaman perkebunan lainnya adalah teh, tembakau, lada, tebu, cengkeh, kapuk, melati gambir, nilam, pandan, pinang, glagah arjuna, sereh, dan melinjo.
10. Di sub sektor peternakan produksi total daging ruminansia sebesar 4.118.610 kg, produksi telur ayam ras sebesar 3.520.793 kg, ayam buras sebesar 532.444 kg dan telur itik sebesar 155.084 kg. Komoditas lainnya adalah susu sapi dengan produktivitas 28.600 liter/tahun.
11. Sub sektor perikanan belum mampu menjadi sektor basis selama 5 tahun terakhir. Meskipun terlihat adanya kecenderungan peningkatan kontribusi subsektor perikanan, namun perkembangan produksinya masih relatif rendah. Produksi ikan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 sebesar 2.472,9 ton/tahun dari luasan kolam 157 hektar.

#### II.1.4.9 Ketahanan Pangan

1. Masih tingginya ketergantungan kebutuhan pangan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga menjadi permasalahan tersendiri dalam pembangunan ekonomi. Tingginya ketergantungan konsumsi pada beras mengakibatkan tekanan terhadap peningkatan produksi padi semakin tinggi.
2. Produksi beras Purbalingga sudah dapat memenuhi sekitar 130 persen kebutuhan beras. Namun ke depan perlu dikembangkan dan dikampanyekan penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan sumber bahan pangan pokok karbohidrat lain yang



tersedia dan potensial untuk dikembangkan, yaitu palawija dan umbi-umbian. Di sisi lain, sumber protein yang berasal dari daging, telur, dan susu, tingkat konsumsinya masih relatif rendah. Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2004 dengan tingkat konsumsi energi sebesar 2.000 kilo kalori per kapita per hari (kkal/kap/hari) baru mencapai skor 73,8 dari skor ideal sebesar 100. Konsumsi sumber energi dari beras yang sebetulnya hanya dibutuhkan sebesar 1.000 kkal/kap/hari, tingkat konsumsinya mencapai 1.317 kkal/kap/hari, sedang tingkat konsumsi protein hewani yang dibutuhkan sebesar 15 gram/kapita/hari, tingkat konsumsinya hanya mencapai 9,14 gram/kapita/hari. Pola konsumsi seperti itu masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia.

## II.1.5 Sarana dan Prasarana

### II.1.5.1. Perhubungan

1. Kebutuhan penyediaan infrastruktur penunjang bagi kegiatan ekonomi dan sosial terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan dinamika sosial ekonomi. Kondisi ini ternyata tidak diikuti oleh kemampuan belanja pemerintah sehingga kebutuhan infrastruktur tersebut belum dapat sepenuhnya dipenuhi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
2. Pada tahun 2003, dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 709,86 km, sekitar 119,25 km atau 16,8 persen masih dalam kondisi jalan tanah, sekitar 213,04 km atau 30,15 persen merupakan jalan aspal, dan sisanya merupakan jalan kerikil dan batu.
3. Tingginya kerusakan jalan akibat beban yang berat (*overload*) dan sistem penanganan yang kurang optimal disebabkan terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah berakibat pada hancurnya jalan sebelum umur teknis tercapai, sehingga diperlukan



biaya tambahan untuk memperbaikinya. Hal tersebut akan berimplikasi pada berkurangnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan atau peningkatan jalan yang lain.

4. Sementara itu, belum lengkapnya rambu lalu lintas dan marka jalan menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan manajemen dan fasilitas lalu lintas.

#### II.1.5.2. Perumahan dan Permukiman

1. Masyarakat yang tinggal di perdesaan belum banyak mendapatkan akses pelayanan air bersih dari PDAM. Mereka umumnya mengupayakan pemenuhan air bersih dengan berbagai cara, seperti membuat sumur gali, sumur bor, serta memanfaatkan mata air yang digunakan baik secara individual maupun secara bersama (komunal). Di samping itu, sebagian masyarakat juga memanfaatkan sumber air lainnya seperti air sungai atau saluran irigasi yang tidak memenuhi syarat baku mutu air. Pengembangan fasilitas air bersih bagi wilayah rawan kekeringan masih jauh dari memadai. Beberapa fasilitas air bersih yang telah dibangun tidak digunakan secara optimal karena berbagai alasan.
2. Rata-rata cakupan pelayanan air bersih oleh PDAM Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2004 sebesar 11,96 persen, jauh di bawah standar Departemen Pekerjaan Umum, sebesar 55 – 75 persen.
3. Di kawasan terbangun, luas daerah resapan jauh lebih sedikit daripada di kawasan lindung. Hal yang masih harus dipertimbangkan adalah kecukupan luas kawasan resapan, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki luas lahan terbangun relatif besar.
4. Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan perumahan secara layak sehingga kualitas lingkungan permukiman relatif rendah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam penyediaan rumah yang layak huni dan penataan



serta penyediaan berbagai fasilitas permukiman sangat diperlukan. Pada tahun 2005 jumlah rumah keluarga miskin yang kurang layak huni di Kabupaten Purbalingga sebanyak 10.528 unit rumah.

5. Melalui Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (PSPR-Gakin) dan dukungan swadaya masyarakat, pada tahun 2003 telah berhasil dipugar sebanyak 3.054 rumah kurang layak huni, dan pada tahun 2004 sebanyak 4.451 rumah.
6. Salah satu permasalahan di sektor permukiman adalah masalah persampahan. Pelayanan penanganan timbunan sampah masih terkonsentrasi di perkotaan dan tempat-tempat umum. Jumlah timbunan sampah yang mencapai 288 m<sup>3</sup>/hari baru dapat tertangani sebanyak 145 m<sup>3</sup>/hari. Sementara itu, jumlah prasarana persampahan khususnya tempat pembuangan sementara (TPS) dan transfer depo, masih sangat sedikit, terlebih lagi di perkampungan. Penanganan persampahan di tempat pembuangan akhir (TPA) juga masih menggunakan sistem *open dumping*, belum menggunakan sistem *sanitary landfill* yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

#### II.1.5.3. Sumber Daya Air

1. Kebutuhan infrastruktur yang sangat mendesak sekaligus membutuhkan investasi pembangunan yang sangat besar adalah infrastruktur irigasi dan pengairan. Selain infrastruktur yang terkait dengan pengelolaan potensi sumber daya air, juga sangat dibutuhkan berbagai bangunan dalam rangka konservasi sumber daya air, khususnya normalisasi aliran sungai yang telah banyak berubah akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
2. Kabupaten Purbalingga yang sebagian besar wilayahnya berada di lereng gunung memiliki ketersediaan air yang cukup melimpah. Namun distribusinya tidak merata, baik secara spasial maupun waktu. Dari segi spasial, beberapa wilayah mengalami kesulitan dalam penyediaan air untuk



kegiatan budidaya pertanian. Dari segi distribusi waktu, 80 persen air tersedia pada musim penghujan yang berdurasi sekitar lima bulan, sedangkan 20 persen lainnya tersedia pada musim kemarau dengan rentang waktu tujuh bulan. Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan selain bermanfaat, juga potensial menimbulkan banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau kelangkaan air potensial pula menimbulkan kekeringan yang berkepanjangan.

3. Areal sawah beririgasi yang ada di Kabupaten Purbalingga seluas 22.213 hektar, terdiri dari 7.876 hektar beririgasi teknis, 3.701 hektar beririgasi setengah teknis, dan 6.586 hektar beririgasi sederhana. Selain itu, terdapat sawah tadah hujan yang pada umumnya berada di wilayah dataran tinggi sehingga tidak memungkinkan pemberian air irigasi dari sungai dan sumber air lain di wilayah tersebut. Sawah tadah hujan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir tahun 2004 terhitung seluas 4.050 hektar. Untuk menyuplai air pada areal pertanian telah terbangun jaringan dan bangunan irigasi berupa bangunan utama sebanyak 101 unit, bangunan pengatur sebanyak 554 unit, bangunan pembawa sebanyak 1.242 unit, dan saluran sepanjang 233 km.
4. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku di luar keperluan budidaya pertanian semakin meningkat. Kebutuhan air yang semakin meningkat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan air yang memadai dan merata sehingga terjadi kelangkaan air di beberapa wilayah. Di wilayah Kecamatan Kejobong dan Pengadegan, serta beberapa wilayah di Kecamatan Kemangkon, kekurangan air terjadi setiap tahun, khususnya pada musim kemarau. Pada sisi lain, masih banyak sumber air yang belum dimanfaatkan secara optimal.

#### II.1.5.4. Energi

1. Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan energi, khususnya energi



listrik, adalah masih rendahnya tingkat elektrifikasi. Meskipun seluruh desa di Kabupaten Purbalingga sudah mendapatkan pelayanan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN), ternyata sampai tahun 2002 tingkat elektrifikasi di Kabupaten Purbalingga masih rendah, yakni sekitar 53 persen. Artinya, hampir separuh jumlah rumah tangga belum mendapatkan pelayanan kelistrikan. Hal ini disebabkan jaringan transmisi PLN belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, terutama wilayah pedukuhan yang terpencil. Sementara itu, kapasitas pasokan energi PLN juga sangat terbatas.

#### II.1.5.5. Telekomunikasi

1. Pemenuhan kebutuhan telekomunikasi sebagai wahana terselenggaranya arus informasi yang cepat, jelas, dan akurat, baik pada tataran lokal, nasional, maupun internasional, sangat penting guna mendukung berbagai aktivitas sosial ekonomi. Tidak memadainya prasarana dan sarana telekomunikasi akan menghambat laju perkembangan daerah dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Pada saat ini, jangkauan layanan telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga masih sangat timpang. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan layanan telekomunikasi. Jumlah sambungan telepon tetap (STT) masih belum optimal, dimana beberapa wilayah kecamatan masih belum terjangkau STT. Sementara sambungan telepon bergerak (STB) juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, meskipun area layanan terus mengalami peningkatan. Jumlah pengguna dan penyedia jasa internet juga masih jauh dari harapan.

### II.1.6 Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan

#### II.1.6.1. Wilayah

1. Perbedaan kapasitas dan potensi antar wilayah telah menyebabkan perbedaan laju perkembangan antarwilayah. Di sisi lain, perbedaan karakteristik antarwilayah, seperti perbedaan kondisi geografis, agroekologi, sosial, ekonomi, demografis, kondisi



- infrastruktur, dan kondisi alamiah lainnya, menyebabkan permasalahan dan kebutuhan pembangunan antarwilayah juga berbeda.
2. Ketersediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan sosial dan infrastruktur diharapkan akan mendorong berbagai aktivitas sosial ekonomi sehingga akselerasi pembangunan wilayah juga meningkat. Masih adanya kesulitan akses ke beberapa wilayah akibat rendahnya kualitas infrastruktur jalan harus mendapat perhatian sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
  3. Beberapa wilayah di bagian utara Kabupaten Purbalingga yang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk relatif rendah dan permukiman penduduk yang menyebar, menghadapi kendala aksesibilitas. Terbatasnya akses (transportasi dan telekomunikasi) yang menghubungkan wilayah tersebut dengan wilayah lain yang relatif lebih maju; terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi (pasar, bank, listrik, dan jaringan distribusi); dan terbatasnya sarana dan prasarana sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) yang berkualitas; serta kondisi dan potensi wilayah yang relatif rendah, telah menjadikan daerah tersebut menjadi wilayah tertinggal.
  4. Kondisi sarana dan prasarana perkotaan sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum serta pusat berbagai aktivitas sosial ekonomi masih perlu ditingkatkan. Selain melancarkan berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana perkotaan yang memadai juga dapat meningkatkan daya tarik kota bagi kegiatan investasi dan lainnya. Sarana dan prasarana dasar perkotaan seperti drainase, jalan, fasilitas persampahan, dan sebagainya masih perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Demikian juga berbagai fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi seperti sarana dan prasarana perdagangan, pelayanan pemerintahan, pelayanan jasa transportasi, berbagai fasilitas rekreasi, olahraga, dan seni budaya, termasuk ruang terbuka hijau, masih perlu ditingkatkan.



#### II.1.6.2. Tata Ruang

1. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan desakan terhadap potensi sumber daya lahan dan ruang semakin kuat. Meningkatnya penggunaan lahan dan ruang untuk penyediaan berbagai fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta pembangunan berbagai infrastruktur menyebabkan semakin berkurangnya lahan dan ruang. Sementara lahan merupakan sumber daya vital bagi kegiatan produksi pertanian yang menjadi sumber bahan pangan pokok manusia. Hal tersebut mengharuskan adanya efisiensi pemanfaatan lahan dan ruang, terutama bagi pembangunan fisik.

2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih relatif tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan industrialisasi. Investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang belum sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan.

3. Pelaksanaan pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang yang dilakukan belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan wilayah dan tata ruang yang telah dibuat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Permasalahan yang muncul kemudian adalah sering terjadinya konflik dalam pemanfaatan ruang dan lahan, baik konflik antarpengguna lahan (konflik



horizontal), konflik dalam tataran kebijakan pengembangan dunia usaha dan investasi (konflik vertikal antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha), maupun konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

#### II.1.6.3. Pertanahan

1. Terkonsentrasinya penduduk di wilayah tertentu, khususnya di wilayah perkotaan, telah menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam (SDA) di sekitar kota untuk mendukung kehidupan masyarakat serta terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri.
2. Pada tahun 2004 jumlah kepemilikan tanah bersertifikat terdiri dari 112.531 buah hak milik, 1.231 buah hak guna bangunan, 96 buah hak pakai, dan 401.077 buah girik.

#### II.1.7 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1 Pada saat ini kondisi lingkungan hidup masih mampu mendukung kehidupan manusia. Namun disadari bahwa kualitas lingkungan hidup terus mengalami penurunan. Hal ini antara lain ditandai dengan gejala menurunnya kekayaan plasma nutfah terutama berupa biota yang hidup di perairan umum, berbagai jenis binatang dan tanaman langka, serta terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Degradasi kualitas lingkungan hidup ini selain merupakan penurunan aset, juga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung.
- 2 Pencemaran lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kurangnya perhatian terhadap kelestarian lingkungan, serta kurangnya upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam yang rusak, telah mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan.



- 3 Karena kondisi geografisnya, di Kabupaten Purbalingga terdapat kawasan yang rawan terhadap ancaman longsor, banjir, kekeringan, dan/atau bencana alam lainnya. Kondisi rawan bencana ini, selain mengancam keselamatan jiwa penduduk, juga potensial mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar.
- 4 Wilayah Kabupaten Purbalingga termasuk bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu yang terbagi dalam tiga sub-DAS, yakni sub-DAS Klawing, sub-DAS Pekacangan, dan sub-DAS Gintung. Kondisi tutupan lahan yang ada dikategorikan ke dalam kondisi buruk dan sangat buruk (23,67 persen), sedang (65,62 persen), serta baik dan sangat baik (10,72 persen).
- 5 Kondisi lahan di areal budidaya pertanian didominasi oleh lahan dengan kategori potensial kritis seluas 24.531,31 hektar (44,56 persen), lahan tidak kritis seluas 17.931,30 hektar (32,57 persen), lahan agak kritis seluas 9.546,28 hektar (17,34 persen), lahan kritis seluas 1.982,43 hektar (3,60 persen), dan lahan sangat kritis seluas 1.059,91 hektar (1,93 persen).
- 6 Pada saat ini, kondisi lahan kritis di kawasan lindung di luar kawasan hutan sudah mulai rusak. Hal tersebut dapat dilihat dari luasnya lahan agak kritis yang mencapai 5.337,02 hektar (55,42 persen), lahan potensial kritis seluas 2.367,57 hektar (24,59 persen), lahan kritis seluas 1.375,31 hektar (14,26 persen), lahan tidak kritis seluas 539,52 hektar (5,60 persen), dan lahan sangat kritis seluas 10,25 hektar (0,11 persen).
- 7 Kondisi lahan kritis di areal kawasan hutan produksi di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh lahan potensial kritis dengan luas 11.421,97 hektar (95,97 persen), disusul oleh lahan agak kritis dengan luas 480,21 hektar (4,03 persen).
- 8 Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Purbalingga kondisinya didominasi oleh lahan yang dikategorikan potensial kritis dengan luas 1.181,02 hektar.
- 9 Kabupaten Purbalingga memiliki potensi sumber daya alam yang beranekaragam, baik yang terbarukan (*renewable*)



seperti hutan, ternak, ikan, tumbuhan penghasil getah, buah, biji dan sebagainya, maupun yang tidak terbarukan (*non-renewable*), khususnya bahan tambang, dan sumber daya alam golongan *continous flow* seperti air, udara, dan tanah.

- 10 Sumber daya alam yang telah dimanfaatkan secara intensif antara lain sumber daya hutan, sumber daya mineral, sumber daya air, dan sumber daya lahan untuk budidaya. Sumber daya hutan di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Gunung Slamet Timur. Luas hutan tercatat 20.429,16 hektar atau 26,26 persen dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Luas hutan yang ada masih di bawah luas hutan minimum sebagaimana diatur pada UU No 41/1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan, yaitu sebesar 30 persen. Sumber daya mineral yang ada berupa bahan galian C atau non-strategis/non-vital. Bahan galian C ini terdiri dari bahan galian *andesit*, tanah urug, sirtu, batu pasir, *trass*, batu gamping, kalsit, lempung *alluvial*, lempung sedimen, batu setengah permata, dan *lignit*. Bahan galian *andesit* yang digunakan untuk bahan bangunan terdapat di 23 lokasi tanah hak milik dengan luas sebaran sekitar 350 hektar serta cadangan tidak kurang dari 108,75 m<sup>3</sup>, dan pada 29 lokasi kawasan hutan dengan luas sebaran 3.470 hektar serta cadangan tidak kurang dari 100 juta m<sup>3</sup>. Selain itu terdapat andesit batu tempel (*sheeting joint andesita*) dengan luas sebaran 215 hektar serta cadangan mencapai 6,5 juta m<sup>3</sup>.
- 11 Bahan galian tanah urug terdapat di 19 lokasi dengan sebaran 410 hektar dan cadangan 13,5 juta m<sup>3</sup>. Sirtu terdapat di 55 lokasi dengan luas sebaran sekitar 21.600 hektar dan cadangan 13,5 juta m<sup>3</sup>. Batu pasir terdapat di 24 lokasi dengan luas sekitar 4.400 hektar dan cadangan tidak kurang dari 145 juta m<sup>3</sup>. *Trass* terdapat di empat lokasi dengan luas sebaran mencapai 450 hektar dan cadangan sebanyak 12 juta m<sup>3</sup>. Batu gamping terdapat di empat lokasi dengan luas sebaran 40 hektar dan cadangan sebanyak 530.000 m<sup>3</sup>. Kalsit yang dapat dipakai sebagai bahan aditif dalam obat-obatan dan kimia serta bahan baku pembuatan keramik, kosmetik,



isolator, terdapat di tiga lokasi dengan cadangan sebanyak 15.000 m<sup>3</sup>. Lempung (*alluvial*) terdapat di 65 lokasi dengan luas sebaran 7.250 hektar dan cadangan sebanyak 365 juta m<sup>3</sup>. Lempung (sedimen) terdapat di 22 lokasi dengan luas sebaran 3.250 hektar dan cadangan sebanyak 165 juta m<sup>3</sup>. Batu setengah permata terdapat di delapan lokasi dengan luas sebaran 70 hektar dan cadangan sebanyak 110.000 m<sup>3</sup>. Bahan galian *lignit* terdapat di Kecamatan Rembang dengan cadangan relatif kecil yaitu sebanyak 3.000 m<sup>3</sup>.

- 12 Sumber daya air yang berasal dari mata air tercatat ada 163 titik dengan kapasitas 5.044,45 liter per detik, sehingga jumlah potensi sumber daya air dalam satu tahun sebesar 159.083,352 liter. Potensi sumber daya air tanah tercatat sebanyak 471.412.367 m<sup>3</sup>.
- 13 Perkembangan jumlah penduduk serta meningkatnya intensitas aktivitas seperti pertanian, industri, rumah sakit, transportasi, aktivitas rumah tangga, dan lain-lain yang kurang memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup, telah menyebabkan pencemaran tanah, air, maupun udara. Akibatnya terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan yang pada akhirnya semakin mengancam kesehatan masyarakat.
- 14 Penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman seperti air bersih, sanitasi, dan persampahan pada umumnya masih belum memadai. Demikian juga penyediaan ruang terbuka hijau, terutama di wilayah perkotaan, persentasenya masih belum memenuhi standar minimal.

## II.2 TANTANGAN

Adanya berbagai perubahan lingkungan internal maupun eksternal akibat pertambahan jumlah penduduk bersamaan dengan menurunnya daya dukung lingkungan dan keterbatasan potensi sumberdaya alam serta dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi akan saling mengkait dan melahirkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang.



## II.2.1 Pemerintahan dan Aparatur

1. Meningkatnya jumlah penduduk dan tuntutan kebutuhan masyarakat seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat akan berimplikasi pada meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumber daya yang dimiliki, di masa mendatang Kabupaten Purbalingga menghadapi tantangan yang semakin berat dimana kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi akan semakin kompleks dan meningkat sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi menyebabkan meningkatnya tuntutan akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan atau reformasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek kelembagaan; aspek sumber daya manusia; dan aspek penyelenggaraan administrasi yang terdiri dari kinerja perencanaan, pengawasan dan pengendalian, kearsipan, serta pelayanan publik.

3. Adanya kecenderungan meningkatnya kepentingan dunia usaha dan pemilik modal terkait dengan kebijakan pemerintah, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan agar kepentingan publik terlindungi. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai regulasi sebagai upaya mengantisipasi dampak negatif dari perluasan aktivitas dan kepentingan bisnis terhadap kepentingan publik yang lebih luas.
4. Meningkatnya kebutuhan pelayanan publik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya standar kehidupan masyarakat juga menyebabkan terus meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah. Meningkatnya beban belanja pemerintah daerah apabila tidak diikuti dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah



adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal daerah. Meskipun demikian, upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak boleh berakibat kontraproduktif bagi perekonomian rakyat. Upaya peningkatan PAD sejauh mungkin diupayakan melalui berbagai sumber yang tidak membebani masyarakat.

5. Terbatasnya potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki daerah, terutama sumberdaya finansial, di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan selain menuntut optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya pembangunan, juga membutuhkan peran swasta guna meningkatkan akselerasi pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kemampuan daerah dalam menarik dan memanfaatkan investasi swasta.
6. Era globalisasi yang ditandai dengan semakin intensnya aktivitas lintas batas serta mobilitas sumber daya yang sangat cepat antarwilayah dan antarnegara membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan rente ekonomi. Bersamaan dengan itu, adanya dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang cepat seiring makin deras arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya, dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (*digital divide*), semakin memunculkan ketidakpastian. Dalam kondisi yang demikian, eksistensi suatu daerah atau negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan daya saing yang dimiliki masing-masing. Untuk dapat menjawab tuntutan perubahan yang dinamis ini dibutuhkan aparatur pemerintah yang handal dan profesional guna mengantisipasi, menggali potensi, dan mengembangkan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Dengan demikian, pemerintah mampu menyelenggarakan fungsinya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang mampu menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien.
7. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan serta dinamika lingkungan internal maupun eksternal, dan berkembangnya kebutuhan masyarakat memerlukan



penyesuaian kelembagaan perangkat daerah dan pemerintahan desa secara terus-menerus.

8. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat cepat pada saat ini, selain merupakan peluang bagi pengembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi tantangan bagi praktik administrasi pemerintahan. Di masa yang akan datang, seiring dengan kemajuan masyarakat, penggunaan TIK merupakan keniscayaan karena akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, serta mendorong diterapkannya prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu, perlu dilakukan upaya terus-menerus dalam rangka pemanfaatan dan sosialisasi TIK dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business*, dan *cyber law*. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain, diperlukan peningkatan fungsi kehumasan dengan memanfaatkan berbagai media, baik media komunikasi verbal, cetak, audio, audio visual, maupun *cyber net*.

## II.2.2 Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban

1. Kondisi masyarakat bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, dengan berbagai adat dan budaya, selain merupakan kekuatan juga mengandung potensi ancaman bagi integrasi bangsa dan negara. Sementara itu, globalisasi yang mengaburkan batas-batas wilayah menyebabkan semakin gencarnya penetrasi budaya asing. Hal ini merupakan salah satu ancaman bagi integritas kebangsaan. Oleh karena itu, upaya penanaman dan pengembangan semangat nasionalisme harus terus dilakukan.
2. Kecenderungan muncul dan berkembangnya paham ekstrim dan radikal, terutama radikalisme agama, merupakan tantangan yang harus terus diwaspadai.
3. Kehidupan demokrasi Indonesia yang masih dalam proses mencari bentuk serta belum terwujudnya kedewasaan berpolitik, potensial memunculkan ancaman konflik sosial dan politik, baik pada tataran horizontal maupun vertikal. Kondisi ini harus mendapatkan perhatian agar dapat



diwujudkan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis.

4. Belum berkembangnya budaya hukum serta belum berkembangnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, pengangguran, kemiskinan, serta kepadatan penduduk yang terus meningkat, merupakan faktor korelatif kriminogen dan *police hazard* yang apabila tidak dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan konvensional. Faktor korelatif kriminogen dan *police hazard* ini hanya dapat diredam oleh sikap dan perilaku masyarakat yang patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan terus-menerus guna mengembangkan budaya hukum dalam segala aspek kehidupan.
5. Kecenderungan meningkatnya intensitas tindak kekerasan dan kriminalitas dalam masyarakat merupakan patologi sosial dan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram. Selain mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat, perilaku kekerasan secara psikologis juga akan merangsang timbulnya perilaku kekerasan yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
6. Peredaran minuman keras dan penyalahgunaan narkoba juga telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Angka nasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari dua juta pecandu narkoba yang 90 persennya adalah generasi muda.

Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan minuman keras dan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani maupun mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.



7. Terus meningkatnya intensitas permasalahan di bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum, memerlukan peningkatan jumlah dan kualitas aparat pemerintah yang berwenang. Pada saat ini jumlah dan kualitas anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang berwenang memelihara ketentraman dan ketertiban umum dirasakan masih sangat kurang.
8. Sejalan dengan gerak laju reformasi pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai dasar pijakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah di masa mendatang dituntut menyiapkan regulasi yang implementatif, aspiratif, dan demokratis dalam berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan.

## II.2.3 Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama

### II.1.3.1. Pendidikan

1. Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan di seluruh wilayah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Selain itu, kualitas penyelenggaraan pendidikan harus terus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien.
2. Dinamika perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan semakin rendahnya penduduk usia muda menyebabkan penurunan siswa SD/MI dan SMP/MTs. Seiring dengan itu, terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah SLTA yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana serta tenaga pendidikan jenjang SLTA. Pada saat yang sama, juga terjadi peningkatan proporsi penduduk usia dewasa yang menuntut peningkatan pelayanan pendidikan nonformal guna meningkatkan keterampilan dan kompetensinya. Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu bersaing



di pasar tenaga kerja atau menciptakan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran.

3. Eksistensi dan kemajuan suatu negara atau daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan daya saing, serta jati diri warganya. Guna mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan memiliki jati diri, taraf pendidikan masyarakat harus ditingkatkan. Untuk itu, selain diperlukan peningkatan penyediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, juga dibutuhkan peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik agar dapat menghasilkan peserta didik yang cerdas dan kreatif, berbudi luhur, serta memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Di samping itu juga diperlukan perubahan paradigma pendidikan dengan mengarusutamakan pendidikan budi pekerti dan internalisasi semangat kebangsaan serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, antara lain melalui pendidikan budi pekerti dan pendidikan seni budaya.

Selain itu, demi menjawab tantangan jaman, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, juga perlu ditingkatkan.

#### II.1.3.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Persaingan yang makin tinggi di era globalisasi menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dalam rangka meningkatkan kemampuan Iptek daerah, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi Iptek di sektor industri; meningkatkan efektivitas mekanisme intermediasi Iptek; memperkuat sinergi kebijakan Iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya Iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan operasionalisasi Iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; mengatasi kemiskinan; serta meningkatkan



ketersediaan dan kualitas sumber daya Iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan Iptek; melalui lembaga Iptek daerah yang handal dan berkualitas.

#### II.1.3.3. Kepemudaan dan Olahraga

1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan arus globalisasi telah menyebabkan semakin kuatnya pengaruh budaya global yang mengakibatkan berkembangnya materialisme dan hedonisme; melemahnya idealisme; terkikisnya nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa serta semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Di sisi lain, kurangnya upaya pengenalan terhadap budaya bangsa dan penanaman semangat nasionalisme telah semakin menyurutkan kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya dan jati diri bangsa. Apabila tidak dilakukan upaya bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa dan Tanah Air, dikhawatirkan di masa mendatang eksistensi bangsa semakin memudar, bahkan menghilang.
2. Meningkatnya jaringan peredaran serta penggunaan narkoba dan minuman keras sampai ke pelosok desa merupakan ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Untuk itu, diperlukan upaya terus-menerus guna membentengi generasi muda dari pengaruh bahaya narkoba dan minuman keras.
3. Semakin pesatnya peningkatan prestasi olahraga di tingkat dunia, nasional maupun regional akibat peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembinaan prestasi olahraga merupakan tantangan yang berat bagi kemajuan olahraga di Kabupaten Purbalingga.
4. Kemajuan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh tingkat kemajuan di bidang ekonomi. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan



peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat secara berkelanjutan diperlukan upaya peningkatan kewirausahaan di kalangan generasi muda.

#### II.1.3.4. Kesehatan

1. Adanya transisi epidemiologi dan penyebaran penyakit menular yang tidak mengenal batas wilayah, maka perlu diwaspadai berjangkitnya penyakit yang sebetulnya bukan endemik di Kabupaten Purbalingga, seperti malaria; penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi (TBC, campak, tetanus, polio, difteri dan pertusis), dan HIV/AIDS.
2. Adanya perubahan gaya hidup seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat membawa dampak pada perubahan pola konsumsi makanan masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya dapat memicu timbulnya penyakit degeneratif, antara lain penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes melitus. Untuk itu, upaya pembangunan kesehatan di masa yang akan datang selain berorientasi pada upaya penanggulangan penyakit menular juga diarahkan pada upaya peningkatan pencegahan penyakit degeneratif melalui pengembangan budaya hidup sehat.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan berkembangnya semangat materialisme dan hedonisme serta persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan rente ekonomi akan meningkatkan kecenderungan munculnya penyakit kejiwaan. Untuk itu, upaya pembangunan kesehatan juga diarahkan pada pembangunan kesehatan jiwa masyarakat/penanganan penyakit jiwa masyarakat.
4. Disamping itu, semakin meningkatnya pencemaran tanah, air, dan udara yang diakibatkan oleh aktivitas industri dan rumah tangga yang tidak ramah lingkungan, bertambahnya jumlah



kendaraan bermotor, serta pencemaran bahan pangan akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam budidaya pertanian dan meningkatnya penggunaan bahan aditif dikhawatirkan semakin memicu peningkatan kejadian penyakit degeneratif di masa mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah antisipatif melalui peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian kualitas kesehatan lingkungan, pengawasan peredaran obat, makanan, dan bahan aditif, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan penanganan penyakit degeneratif.

#### II.1.3.5. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Terus meningkatnya jumlah penduduk merupakan tantangan besar di masa mendatang. Peningkatan jumlah penduduk dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum apabila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kualitas berbagai prasarana dan sarana pelayanan publik; penyediaan lapangan kerja; dan peningkatan tata kelola kehidupan sosial, budaya, dan politik.

Selain itu, besarnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan potensi sumber daya pendukung juga menyebabkan desakan terhadap lingkungan semakin besar akibat eksploitasi sumber daya alam dan berbagai aktivitas manusia. Apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali, kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dikhawatirkan akan terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, pengendalian laju pertumbuhan penduduk harus menjadi salah satu prioritas pembangunan.

#### II.1.3.6. Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

1. Krisis ekonomi tahun 1997 yang berkepanjangan dikhawatirkan memberikan dampak jangka panjang, baik dampak langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak krisis ekonomi tersebut adalah meningkatnya jumlah keluarga



miskin. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup pokok bagi keluarga miskin, terutama pangan, papan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan, menyebabkan keluarga miskin semakin rentan terhadap gangguan kesehatan. Hal ini menyebabkan relatif rendahnya produktivitas orang miskin. Bagi anak-anak keluarga miskin, kurangnya kecukupan pangan dan gizi, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, berakibat kurang baik bagi tumbuh kembang, kemampuan daya pikir, dan kecerdasan mereka. Kondisi ini dikhawatirkan memberikan dampak jangka panjang berupa penurunan kualitas generasi yang akan datang.

Sedangkan dampak tidak langsung krisis ekonomi terutama berupa peningkatan angka kriminalitas dan tindak kekerasan dalam masyarakat. Kondisi ini juga berdampak jangka panjang karena pemulihannya dalam aspek psikologi sosial membutuhkan waktu lama.

2. Masih relatif tingginya jumlah keluarga miskin di tengah tingginya permasalahan dan tantangan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi, adanya budaya masyarakat yang kurang produktif, serta terbatasnya kemampuan pemerintah menjadikan permasalahan kemiskinan masih merupakan tantangan berat dimasa-masa yang akan datang. Untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan upaya yang sistematis, komprehensif dan berkelanjutan, yang meliputi upaya perlindungan sosial bagi keluarga miskin, pencegahan pewarisan kemiskinan dan pengentasan keluarga miskin agar dapat keluar dari kemiskinan serta pencegahan timbulnya keluarga miskin baru. Untuk itu dibutuhkan kebijakan pembangunan di segala bidang yang secara nyata berpihak kepada rakyat miskin. Kebijakan pembangunan harus mampu menjamin kecukupan kebutuhan pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan bagi keluarga miskin. Di bidang



ekonomi, pembangunan harus memberi ruang bagi partisipasi seluruh rakyat termasuk kaum miskin dalam proses produksi. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diarahkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya; memperhatikan aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi terutama bagi kaum miskin; meningkatkan pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah; serta mengembangkan investasi yang memperluas kesempatan kerja dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.

#### II.1.3.7. Kebudayaan dan Kehidupan Beragama

1. Derasnya arus globalisasi di tengah semakin melemahnya semangat kebangsaan dan rasa cinta Tanah Air; luruhnya nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pudarnya solidaritas sosial, kekeluargaan, dan semangat gotong royong; serta semakin terkikisnya kebanggaan atas jati diri bangsa oleh nilai-nilai budaya asing, merupakan tantangan berat yang harus diatasi di masa kini dan yang akan datang. Demikian juga, berkembangnya materialisme dan hedonisme; berkembangnya mentalitas menerabas; kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, karya, dan inovasi; serta meningkatnya budaya kekerasan, premanisme, dan kriminalitas, merupakan tantangan berat yang harus ditangani di masa kini dan yang akan datang melalui pembangunan bidang pendidikan, agama, dan kebudayaan yang sistematis dan berkelanjutan.
2. Berkembangnya sektarianisme yang mendorong eksklusivisme dan radikalisme agama juga merupakan salah satu tantangan yang harus diwaspadai karena dapat menimbulkan disharmoni sosial, bahkan dapat mengancam eksistensi negara kesatuan. Oleh karena itu, pengembangan



kerukunan hidup inter dan antar umat beragama harus mendapat perhatian.

Nilai-nilai agama yang belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata merupakan tantangan dalam pembangunan bidang agama. Hal ini tercermin pada berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas keagamaan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan dan pengembangan kehidupan beragama perlu ditingkatkan. Di bidang pendidikan formal, kendala utamanya adalah kurangnya jumlah dan mutu tenaga pendidik, kurang tertatanya kurikulum, terbatasnya sarana dan prasarana, dan kurangnya fasilitas pendukung lainnya.

#### II.1.3.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Di bidang pemberdayaan perempuan, tantangan yang dihadapi adalah masih belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Masih rendahnya tingkat pendidikan dan masih relatif rendahnya peran perempuan di berbagai bidang menghendaki adanya kebijakan pembangunan yang lebih sensitif gender agar kesetaraan dan keadilan gender segera terwujud.
2. Meningkatnya aktivitas orangtua di luar rumah mengakibatkan intensitas perhatian mereka dalam mendidik dan mengasuh anak semakin berkurang. Selain itu, juga ada kecenderungan meningkatnya eksploitasi terhadap anak dan masih banyaknya anak-anak terlantar. Kondisi ini merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak harus semakin dilembagakan.



## II.2.4 Ekonomi

1. Dalam tatanan ekonomi terbuka di era globalisasi, perekonomian suatu wilayah tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kondisi perekonomian di wilayah lain, perekonomian nasional, dan global. Era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas lintas batas dan mobilitas sumber daya antarwilayah dan antarnegara membawa implikasi meningkatnya persaingan untuk mendapatkan rente ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi nasional maupun global membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah. Salah satu tantangan nyata yang dihadapi daerah pada era globalisasi antara lain adalah masuknya berbagai produk impor yang menjadi pesaing bagi produk usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini tidak dapat dihindari karena Indonesia telah meratifikasi kesepakatan WTO dan pasar bebas ASEAN (AFTA). Selain itu, penerapan standar ganda dari negara maju sebagai proteksi terhadap masuknya produk luar membawa dampak negatif terhadap pemasaran produk di pasar global. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga secara bertahap harus mampu mewujudkan kondisi ekonomi daerah yang tangguh dengan membangun kompetensi inti dan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi pendayagunaan potensi lokal, termasuk potensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi.

Basis kekuatan ekonomi Kabupaten Purbalingga yang masih mengandalkan sektor primer dengan kualitas terbatas, tidak terstandardisasi, dengan kapasitas produksi yang berfluktuasi, menjadikannya sulit menembus pasar global, bahkan pasar modern dalam negeri. Agar perekonomian daerah terus tumbuh secara berkelanjutan, ke depan basis perekonomian daerah harus diubah dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi yang ada. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara mengembangkan industri pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan bahan mentah menjadi barang jadi. Dengan demikian, nilai tambah produk meningkat, tenaga kerja yang terlibat semakin banyak, dan diharapkan produk yang dihasilkan mampu bersaing menembus pasar yang lebih luas.

2. Meningkatnya jumlah penduduk berakibat pada meningkatnya desakan terhadap sumber daya alam dan



lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan degradasi fungsi lingkungan hidup dan terus merosotnya daya dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia. Kondisi seperti ini apabila tidak dikendalikan dengan sendirinya akan semakin menurunkan derajat kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada upaya memacu pertumbuhan dapat mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Untuk itu, pembangunan ekonomi harus diorientasikan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Artinya, pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek, tetapi harus berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Meningkatnya jumlah penduduk juga membawa konsekuensi pada meningkatnya pemanfaatan lahan untuk permukiman, prasarana sosial ekonomi, dan sebagainya. Akibatnya, ketersediaan sumber daya lahan untuk usaha pertanian akan semakin berkurang. Sementara itu, produktivitas pertanian pada suatu saat tidak bisa ditingkatkan lagi karena sudah mencapai titik optimum dan mengalami kejenuhan input. Berdasarkan kenyataan tersebut, apabila perekonomian daerah terus bertumpu pada sektor pertanian maka pada suatu saat tidak akan mampu tumbuh. Oleh karena itu, perekonomian daerah harus diupayakan agar tidak terus bertumpu pada sektor primer (pertanian) semata, melainkan harus bergeser ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa). Namun sebagai sektor yang sangat strategis sektor pertanian harus tetap mendapatkan perhatian yang besar karena di samping sebagai penghasil bahan pangan, sektor pertanian juga merupakan penyumbang terbesar PDRB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya beban ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi apabila tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk tidak akan memberi arti bagi peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, di masa yang akan datang pembangunan ekonomi menghadapi tantangan yang



semakin berat, apalagi dengan semakin menurunnya potensi sumber daya alam dan kuatnya pengaruh globalisasi.

3. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi meningkatnya beban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tingkat distribusinya timpang. Pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pertumbuhan bisa jadi hanya akan mendorong berkembangnya industri padat modal dan tidak berbasis sumber daya lokal sehingga kurang berarti dalam mengurangi pengangguran dan kurang memberikan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian rakyat. Selain itu, berkembangnya industri yang tidak berbasis potensi lokal (*footloose*) menyebabkan tumbuhnya perekonomian yang rapuh. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi selain diarahkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, juga harus diarahkan guna meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita riil dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
4. Meningkatnya jumlah angkatan kerja seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk menuntut tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang memadai. Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, upaya pembangunan ekonomi selain harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, juga harus ramah tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang ramah tenaga kerja semakin membuka dan memperluas kesempatan kerja dan berusaha, sehingga peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan semakin meningkat. Pada gilirannya, kondisi ini akan meningkatkan kemampuan daya beli dan konsumsi masyarakat, yang secara berantai akan mendorong aktivitas produksi. Aktivitas produksi membutuhkan berbagai faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya, sehingga meningkatkan peluang masyarakat memperoleh pendapatan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan meningkatkan pemerataan pendapatan.

Tingginya angka pengangguran juga dikarenakan rendahnya kualitas SDM tenaga kerja. Hal ini antara lain diakibatkan



rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, atau karena kurangnya relevansi antara kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, selain memperluas kesempatan kerja dan berusaha, tantangan berat ke depan dalam rangka menanggulangi pengangguran adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

5. Di bidang ketenagakerjaan, tantangan yang akan dihadapi dalam kurun waktu sampai 20 tahun ke depan antara lain adalah situasi pertumbuhan penduduk yang masih tergolong tinggi dan rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat maksimal pada periode 2020–2025. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat dari kondisi saat ini. Kondisi ketenagakerjaan nasional tahun 2004 menunjukkan 72,64 persen tenaga kerja berpendidikan SD, 14,48 persen tamatan SLTP, 9,63 persen berpendidikan SLTA, dan yang berpendidikan akademi/universitas hanya sekitar 3,25 persen. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga relatif lebih buruk dibandingkan ketenagakerjaan nasional. Jumlah tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SD ada sekitar 50 persen. Dalam 20 tahun ke depan, komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SLTP dan SLTA. Dengan demikian, pembangunan perekonomian di masa mendatang dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang secara lebih berkualitas, mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi penduduk usia kerja.

## II.2.5 Sarana dan Prasarana

1. Di bidang sarana dan prasarana, tantangan yang dihadapi adalah terus meningkatnya kebutuhan penyediaan dan kualitas prasarana dan sarana seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk; meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat; meningkatnya tuntutan standar kualitas pelayanan; serta adanya kebutuhan peningkatkan aksesibilitas wilayah guna mengurangi disparitas



antarwilayah. Hal ini menuntut peningkatan belanja pemerintah di bidang infrastruktur, baik untuk pembangunan maupun pemeliharaan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang cermat sehingga alokasi belanja pembangunan akan lebih efektif dan efisien.

2. Tantangan lain di bidang prasarana adalah meningkatnya kelangkaan air akibat kondisi lingkungan yang semakin terdegradasi. Kerusakan lingkungan yang antara lain disebabkan degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) hulu dan kawasan tangkapan air akibat kerusakan hutan yang tak terkendali telah menyebabkan peningkatan luasan lahan kritis. Kondisi ini menyebabkan turunnya kemampuan DAS untuk menyimpan air sehingga frekuensi dan besaran banjir meningkat. Sedimentasi yang semakin parah menyebabkan pendangkalan sungai sehingga mengurangi daya tampung dan pengalirannya.

Penggunaan air yang tidak terkontrol menyebabkan menurunnya ketahanan pangan. Penggunaan air irigasi berlebihan di daerah hulu berpotensi menjadikan daerah hilir kekurangan pasokan air. Kondisi ini potensial meningkatkan terjadinya konflik pemanfaatan air. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai bangunan dalam rangka konservasi sumber daya air, khususnya normalisasi aliran sungai yang telah banyak berubah akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, dan upaya penghijauan daerah tangkapan air.

3. Penurunan fungsi hutan lindung dan daerah tangkapan air juga menyebabkan penurunan debit air pada mata air yang selama ini menjadi sumber air bersih. Di sisi lain, kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga dan aktivitas sosial ekonomi dipastikan terus meningkat. Hal ini menghendaki adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan air bersih, antara lain melalui peningkatan kualitas jaringan PDAM serta kualitas pengelolaan air oleh masyarakat.
4. Meningkatnya kebutuhan listrik guna memenuhi keperluan rumah tangga dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di



tengah menurunnya kapasitas pasokan listrik PLN, merupakan tantangan tersendiri di masa mendatang. Di sisi lain, kondisi topografi wilayah Kabupaten Purbalingga yang sebagian besar berbukit-bukit menjadi kendala tersendiri karena sistem interkoneksi belum dapat menjangkau ke seluruh wilayah. Oleh karena itu, pada masa mendatang perlu terus dilakukan upaya pengembangan sumber energi non-PLN, antara lain melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pengembangan potensi energi baru yang terbarukan (EBT) lokal.

5. Tantangan terbesar pada masa sekarang dan yang akan datang adalah pemenuhan kebutuhan rumah. Dengan asumsi bahwa satu rumah tangga memiliki satu unit rumah, maka diperkirakan *backlog* di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2004 mencapai 172.011 unit. Dengan mempergunakan angka laju pertumbuhan penduduk kabupaten sebesar 0,85 persen per tahun sebagai dasar proyeksi, maka kebutuhan rumah layak huni pada tahun 2015 akan membengkak menjadi 187.205 unit dan 203.740 unit pada tahun 2025. Tanpa adanya terobosan kebijakan dari pemerintah maupun pemerintah daerah, maka jumlah kekurangan rumah akan terus terakumulasi, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, rawan miskin, miskin, dan sangat miskin.
6. Di masa mendatang, meningkatnya jumlah penduduk terutama di perkotaan dipastikan akan menyebabkan permasalahan permukiman menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, guna mengantisipasi permasalahan permukiman di masa mendatang perlu ada perencanaan pembangunan permukiman yang komprehensif. Hal yang mendesak dilaksanakan adalah perencanaan dan penataan berbagai kebutuhan permukiman, seperti sistem penanganan sampah, jaringan jalan lingkungan, jaringan pembuangan air limbah, drainase, penyediaan fasilitas peribadatan, dan ruang terbuka. Tanpa adanya perencanaan yang baik dikhawatirkan di masa mendatang akan terus berkembang kawasan kumuh. Peningkatan luas kawasan kumuh tidak dapat dipandang sebagai penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*) belaka, namun juga harus dipandang sebagai penurunan kualitas hidup manusia.



7. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi dampak perkembangan wilayah perkotaan yang terus meningkat, kebutuhan drainase yang berfungsi untuk menyalurkan air limpasan yang tidak terserap ke dalam tanah (*run off*) di Kabupaten Purbalingga masih perlu terus ditingkatkan.
8. Pesatnya kemajuan teknologi, terutama sektor telematika yang merupakan konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi (TI), dan multimedia, memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi secara maya (*virtual*) tanpa mengenal batas teritorial (*borderless*). Globalisasi telah menempatkan Kabupaten Purbalingga sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Namun demikian, jumlah infrastruktur telematika masih belum memadai untuk mendukung daya saing daerah.

#### II.2.6 Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan

1. Masih adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan antarkelompok masyarakat dan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah, terutama antara wilayah perdesaan dan perkotaan akibat perbedaan kondisi alamiah dan potensi wilayah, merupakan tantangan yang harus dapat diatasi. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi (jalan, pasar, listrik, perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya) harus terus dilakukan guna membuka dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terutama di wilayah perdesaan terhadap layanan sosial yang berkualitas perlu disediakan berbagai prasarana dan sarana sosial secara memadai di seluruh wilayah, terutama layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting dilakukan guna menciptakan pusat pertumbuhan baru untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
2. Penataan ruang juga merupakan tantangan berat yang harus dihadapi saat ini dan di masa mendatang. Ketersediaan ruang bersifat statis, sementara populasi manusia terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik



agar tidak menimbulkan masalah akibat ketidakseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan tingkat eksploitasinya.

3. Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas manusia menyebabkan terjadinya kecenderungan penyimpangan pemanfaatan ruang dan penurunan fungsi ruang. Pada saat ini, pemanfaatan ruang banyak yang masih belum sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, antara lain meliputi kawasan lindung, kawasan resapan air, kawasan budidaya, kawasan permukiman, kawasan industri, serta kawasan khusus seperti kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan sebagainya. Penataan ruang, meliputi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang saat ini masih belum optimal harus dibenahi secara berkelanjutan dan sinergis. Demikian juga dokumen penataan ruang yang baru sebagai revisi maupun sebagai pelengkap dokumen yang sudah ada perlu disusun melalui kajian dan analisis yang mendalam agar dapat digunakan sebagai panduan bagi pemanfaatan ruang yang ideal. Untuk mengetahui tingkat penyimpangan dokumen perencanaan ruang yang telah disusun, perlu dilakukan kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut secara berkala.

## II.2.7 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran karena aktivitas manusia merupakan tantangan besar di bidang lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan kebijakan yang



bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan terus menurunnya luasan lahan pertanian menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi sawah dan lahan pertanian produktif lainnya serta rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian. Di sisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya.
3. Sementara itu, kelangkaan energi tak terbarukan juga terus terjadi karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah dengan menciptakan sumber energi alternatif yang berbasis bahan baku lokal.
4. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Hal ini memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari, di samping upaya pematenan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora dan fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing Kabupaten Purbalingga. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara benar di masa mendatang sangat tergantung pada kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang ditentukan oleh kemampuan SDM, organisasi, dan institusi pelaksana. Komponen penentu kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini secara komprehensif harus



terus ditingkatkan guna mengejar berbagai ketertinggalan atau mengoreksi praktik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang keliru.

Belum terwujudnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan kelemahan yang harus dibenahi. Konsep *good environmental governance* harus menjadi dasar dalam implementasi pengelolaan lingkungan hidup. Tata pemerintahan berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan sosial dan ekonomi.

## II.3 MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan Kabupaten Purbalingga adalah seluruh sumber kekuatan, baik yang bersifat efektif maupun potensial, yang dimiliki dan dapat didayagunakan dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga, meliputi:

1. Kondisi geografis Kabupaten Purbalingga yang ada pada ketinggian antara 300 meter sampai dengan 3.500 meter di atas permukaan laut dan kekayaan sumber daya air memberikan keragaman potensi alam yang dapat dikembangkan guna mendorong perekonomian daerah, meliputi usaha budidaya berbagai jenis komoditi pertanian, pengembangan kepariwisataan, serta industri berbasis pertanian.
2. Penduduk dengan jumlah yang besar merupakan sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah.
3. Budaya masyarakat yang terbuka dan demokratis serta situasi daerah yang kondusif memberikan iklim yang *favourable* bagi berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi.
4. Kehidupan politik yang sehat dan dinamis serta hubungan kemitraan yang kooperatif dan sinergis antara lembaga legislatif dan eksekutif sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Tersedianya berbagai infrastruktur penunjang merupakan modal yang sangat berharga untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di masa mendatang.



### **BAB III**

## **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005-2025**

### **III.1 VISI**

Berdasarkan kondisi Kabupaten Purbalingga saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga, maka Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 adalah:

#### **PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA**

Kemandirian daerah adalah kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pengertian “mandiri” berarti tidak selalu tergantung kepada pihak lain, namun bukan berarti lepas atau tidak ada hubungan sama sekali dengan lingkungannya. Maksud dari visi “Purbalingga yang mandiri” adalah bahwa dengan keuletan dan kerja keras, seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan melakukan berbagai upaya guna meningkatkan akselerasi pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan daerah. Hal ini dilakukan melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkannya sendiri, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap semakin dapat dikurangi. Selain itu, perlu terus diusahakan agar kemampuan pembiayaan pembangunan Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya yang memacu perekonomian daerah.

Maksud dari “berdaya saing” adalah bahwa dengan kemandiriannya tidak menjadikan masyarakat dan Pemerintah



Kabupaten Purbalingga mengisolasi diri dari pengaruh dan perkembangan serta dinamika lingkungannya. Sebaliknya, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus senantiasa berupaya meningkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sehingga mampu mengikuti dinamika dan mampu bersaing di era otonomi daerah dan globalisasi.

Maksud dari “sejahtera” adalah bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat sejahtera yang bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, melainkan juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Maksud dari “berakhlak mulia” adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kebudayaan agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin.

### III.2 MISI

Visi Kabupaten Purbalingga akan diwujudkan melalui enam Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik** yang mengarah pada upaya menyelenggarakan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui misi ini juga dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki strategi yang jelas; mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan penyelenggaraan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat. Pemerintah juga dituntut untuk semakin dapat mewujudkan keadilan dan menegakkan hak asasi manusia.
2. **Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berlandaskan Hukum** yang mengarah pada upaya mewujudkan rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan masyarakat dengan mengeliminasi ketegangan dan ancaman konflik, menurunkan angka



kejahatan, serta meningkatkan ketertiban umum; mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta Tanah Air; mewujudkan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis; memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; mengembangkan budaya hukum, meningkatkan kesadaran hukum, serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.

3. **Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme** dengan membangun masyarakat Purbalingga yang mencakup aspek jasmani, rohani, mental, spiritual, dan intelektual yang dilakukan dengan meningkatkan taraf pendidikan, derajat kesehatan, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan sosial, keadilan gender, perlindungan anak dan keberdayaan masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan; serta mengembangkan kehidupan beragama dan meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat; meningkatkan kerukunan hidup inter dan antarumat beragama; mengembangkan kesetiakawanan sosial, toleransi, dan budaya demokrasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat; memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa; mengembangkan semangat nasionalisme; meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan kebudayaan termasuk terhadap budaya lokal untuk mengembangkan kepekaan emosional dan meningkatkan kualitas moral dan intelektual masyarakat serta memantapkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan daerah.
4. **Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan** yang dilakukan melalui berbagai upaya guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup pokok; pengembangan dan peningkatan produktivitas serta daya saing usaha ekonomi rakyat; perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja; serta melakukan berbagai upaya dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah dengan meningkatkan peran sektor industri dan jasa.
5. **Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah** yang diarahkan untuk semakin mendorong akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan, pemeliharaan, dan



rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana perhubungan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana energi dan telekomunikasi, serta berbagai prasarana pelayanan sosial, ekonomi, dan pemerintahan, prasarana perkotaan dan prasarana wilayah lainnya.

6. **Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup** yang meliputi berbagai upaya perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup bagi kehidupan manusia, termasuk memelihara kenyamanan kehidupan manusia di masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dan terkendali, konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta rehabilitasi lingkungan hidup yang telah mengalami degradasi fungsi akibat eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran.



## **BAB IV**

### **ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005-2025**

#### **IV.1 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN**

Sesuai dengan Visi Kabupaten Purbalingga, secara garis besar tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ukuran terwujudnya Kabupaten Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia, pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

##### **IV.1.1. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik, yang ditandai oleh:**

1. Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal.
3. Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan penyelenggaraan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.



4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

#### **IV.1.2. Terwujudnya Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berlandaskan Hukum yang ditandai oleh:**

1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang, menurunnya angka pelanggaran hukum, rendahnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat, meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM).
2. Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan akselerasi pembangunan.
3. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta terwujudnya masyarakat sipil yang mandiri.
4. Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM) yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

#### **IV.1.3. Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri, dan Semangat Nasionalisme yang ditandai oleh:**

1. Meningkatnya kualitas manusia yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan, serta terwujudnya kesetaraan gender yang secara umum diukur



dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

2. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan meningkatnya kualitas intelektual, berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama, berkembangnya budaya baca tulis, meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial, serta berkembangnya semangat gotong royong sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan sosial.
3. Semakin kokohnya jati diri dan kepribadian masyarakat Purbalingga yang tercermin pada berkembang dan meningkatnya apresiasi terhadap budaya yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa.
4. Meningkatnya semangat dan wawasan kebangsaan.

#### **IV.1.4. Terwujudnya Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan yang ditandai oleh:**

1. Terpenuhinya kebutuhan hidup pokok berupa pangan, papan, dan sandang bagi seluruh masyarakat secara memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Untuk itu, ketahanan dan kemandirian pangan harus mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.
2. Meningkatnya pendapatan per kapita riil masyarakat yang semakin merata untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara memadai dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penduduk miskin tidak lebih dari lima persen melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkesinambungan.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga di mana sektor pertanian dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing yang tinggi; terus meningkatnya peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah yang tinggi dan berdaya saing.



4. Meningkatnya investasi swasta yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal dan ramah lingkungan, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah yang memadai sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja dan untuk menanggulangi kemiskinan.

#### **IV.1.5. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang ditandai oleh:**

1. Tersedianya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi sehingga mampu mendorong pembangunan sosial ekonomi, meliputi prasarana perhubungan, irigasi, dan permukiman; terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial ekonomi; serta terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi.
2. Terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, antara lain melalui penyediaan infrastruktur serta berbagai prasarana dan sarana sosial ekonomi untuk mendorong aksesibilitas dan perkembangan aktivitas sosial ekonomi di seluruh wilayah.

#### **IV.1.6. Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup yang ditandai oleh:**

1. Tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.



## IV.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

Untuk mewujudkan daya saing, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, serta membangun masyarakat yang berakhlak mulia, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

### IV.1.1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

Penyelenggaraan pemerintahan harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal agar mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan tantangan sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Sejalan dengan itu, demi menjawab tuntutan reformasi dan demokratisasi serta kebutuhan untuk semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mutlak diperlukan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, pembangunan bidang pemerintahan Kabupaten Purbalingga dalam jangka panjang diarahkan untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan cara meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur melalui koordinasi dan sinergi pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, produktif, dan bertanggung jawab; dan meningkatkan fungsi kehumasan sebagai media komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
2. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan, berpartisipatif dan menikmati hasil-hasil pembangunan; serta mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan penyelenggaraan pembangunan dengan mengembangkan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, mengembangkan perencanaan dari bawah, dan mengoptimalkan fungsi



perencanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan.

3. Mewujudkan pemerintahan yang mampu menggerakkan partisipasi rakyat dengan melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum agar masyarakat semakin dapat menemukan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya, semakin meningkatkan prakarsa dan peransertanya dalam pembangunan, serta semakin dapat bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah.

#### **IV.1.2. Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berlandaskan Hukum**

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tercantum dalam Visi Kabupaten Purbalingga, tidak cukup dengan memenuhi kebutuhan yang bersifat lahiriah, melainkan juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, harga diri, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Oleh karena itu, salah satu misi yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jangka panjang adalah menciptakan Purbalingga yang aman, damai, dan demokratis berlandaskan hukum.

Untuk menciptakan Purbalingga yang aman, damai, dan demokratis berlandaskan hukum, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam jangka panjang meliputi:

1. Pengembangan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal serta melalui penyuluhan dan keteladanan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
2. Pengembangan ketertiban umum dan peningkatan keamanan melalui upaya penegakan hukum, penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas umum dan pelayanan umum, serta peningkatan manajemen fasilitas pelayanan umum; penerbitan dan revisi produk hukum daerah sesuai dinamika sosial ekonomi dan tuntutan kebutuhan.
3. Pengembangan kehidupan politik yang diarahkan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik rakyat dan



mengembangkan etika politik serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga politik; mengembangkan komunikasi politik antara pemerintah, kekuatan politik, dan masyarakat secara intens dan egaliter; memfasilitasi penyelenggaraan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil; mengembangkan tradisi demokrasi dan nilai-nilai demokrasi dalam segala jenjang dan aspek kehidupan; memfasilitasi lembaga-lembaga politik agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

#### **IV.1.3. Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri, dan Semangat Nasionalisme**

Tujuan sebenarnya dari pembangunan adalah membangun manusia guna mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia. Dalam paradigma pembangunan manusia, berbagai upaya pembangunan dimuarakan pada peningkatan kualitas manusia, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan manusia. Dalam perspektif manusia Indonesia, manusia yang berkualitas dicirikan dengan derajat kesehatan yang tinggi, taraf pendidikan yang memadai, kualitas intelektual dan moral yang tinggi, tingkat apresiasi terhadap budaya bangsa yang tinggi, pemahaman serta penghayatan terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kecintaan terhadap Tanah Air yang tinggi, penghayatan dan pengamalan ajaran agama, serta perilaku sosial dan perilaku politik yang sesuai etika. Sejalan dengan hal tersebut, arah pembangunan manusia Purbalingga meliputi:

1. Peningkatan kemampuan dan daya saing seluruh masyarakat Purbalingga termasuk kaum perempuan dalam era globalisasi agar mampu menyelenggarakan kehidupannya secara layak dan mandiri, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia Purbalingga sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi dengan tetap berlandaskan pada norma dan etika yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa, nilai-nilai agama, dan



nilai-nilai universal kemanusiaan yang diselenggarakan secara efisien dan tanpa diskriminasi.

3. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan teknologi khususnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah.
4. Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan dalam rangka pembinaan mental dan peningkatan semangat sportivitas di kalangan generasi muda, selain untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan meningkatkan prestasi. Melalui upaya pembinaan yang intensif dan sistematis serta berkesinambungan, diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga sehingga dapat berbicara di tingkat regional maupun nasional, dan mengharumkan nama daerah, bahkan nama bangsa di dunia internasional.
5. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan SDM kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.
6. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan bidang kehidupan lainnya; terjaminnya pemenuhan kebutuhan hidup pokok, dan bantuan sosial bagi korban bencana alam; serta meningkatkan mutu, manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial.
7. Pembangunan Keluarga Berencana (KB) diarahkan dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui peningkatan kepesertaan KB serta peningkatan kemampuan dan kualitas keluarga.
8. Pembangunan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pembedayaan



kelembagaan masyarakat diarahkan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menemukan kebutuhan dan permasalahan serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi; mampu mengakses berbagai informasi dan sumberdaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya; dan mengetahui hak-haknya di bidang sosial dan ekonomi.

9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan serta meningkatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, memperkuat kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender dan anak, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di semua jenjang perencanaan pembangunan serta menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Penanggulangan kemiskinan diarahkan dalam rangka pencegahan pewarisan kemiskinan dari keluarga miskin kepada keturunannya, pencegahan timbulnya keluarga miskin baru, serta pengentasan keluarga miskin.
11. Pembangunan moral dan keagamaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama sehingga dapat diwujudkan sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama. Pembangunan moral dan keagamaan juga diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etik dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan kerukunan hidup inter dan antarumat beragama. Untuk itu, diperlukan peningkatan pelayanan kehidupan beragama berupa penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan agama dan fasilitas peribadatan, peningkatan pelayanan pelaksanaan ibadah, serta peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial sekaligus sebagai penjaga moral masyarakat yang dinamis.
12. Pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan seiring dengan pembangunan pendidikan diarahkan dalam rangka



pelestarian dan internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas moral masyarakat, sekaligus sebagai penangkal penetrasi nilai budaya asing yang kurang menguntungkan bagi pembangunan karakter bangsa; pengembangan nilai budaya produktif, pengembangan budaya membaca dan menulis; peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya; pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal yang bermanfaat untuk memperkuat jati diri bangsa serta membangun identitas dan kebanggaan terhadap daerah.

13. Pengembangan wawasan dan semangat kebangsaan terutama diarahkan dalam rangka pengenalan pluralitas sosial, budaya, dan geografis Indonesia serta internalisasi nilai-nilai nasionalisme terutama bagi generasi muda dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal.

#### **IV.1.4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan**

Pembangunan ekonomi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya termasuk sumber daya sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Secara umum, arah pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Menjadikan UMKM yang terintegrasi dan termodernisasi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi melalui peningkatan kompetensi, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan produktivitas yang didukung peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi, dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
2. Pemantapan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai lokomotif ekonomi rakyat sehingga dapat menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para



anggotanya, baik selaku produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi

3. Pemantapan peran industri sebagai industri yang berdaya saing baik di pasar regional, nasional maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta terkait dengan perekonomian daerah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pemantapan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utama investasi dengan semakin memantapkan iklim investasi daerah yang menarik sehingga mendorong penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah.
5. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta memantapkan usaha perdagangan dalam memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi.
6. Mengembangkan kepariwisataan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Purbalingga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta memberikan perluasan kesempatan kerja dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi lokal secara arif dan berkelanjutan.
7. Perluasan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan, dan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak serta kemandirian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di era global.
8. Pemantapan Purbalingga sebagai pusat agribisnis di kawasan regional dengan peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah.
9. Menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, terjangkau, berkualitas serta halal sesuai kaidah agama.



10. Mewujudkan sektor keuangan yang mampu memberikan kontribusi dalam penyediaan dana bagi pembiayaan pembangunan pada umumnya dan pembiayaan usaha pada khususnya, melalui pengembangan jangkauan pelayanan jasa keuangan di seluruh wilayah terutama peningkatan kontribusi berbagai jenis lembaga jasa keuangan non-bank dalam pendanaan pembangunan dan pembiayaan usaha ekonomi rakyat.

#### **IV.1.5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah**

Pembangunan prasarana dan sarana wilayah sangat penting dalam rangka menunjang dan mendorong intensitas pembangunan di segala bidang. Arah pembangunan prasarana dan sarana wilayah adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan prasarana transportasi diarahkan untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan pergerakan orang serta distribusi barang dan jasa dalam rangka mendukung dan mendorong aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya dalam mendorong transaksi perdagangan dan proses produksi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana jalan dan jembatan; perluasan jaringan pelayanan angkutan; peningkatan penyediaan dan kualitas sarana pendukung lalu lintas; peningkatan manajemen lalu lintas; serta dengan menciptakan dan menyelaraskan regulasi sesuai kewenangan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa transportasi dan menyusun cetak biru Tata Transportasi Wilayah.
2. Pembangunan sumberdaya air diarahkan untuk menjamin ketersediaan air, khususnya untuk kegiatan pertanian secara umum, yang menjamin ketahanan pangan; mengembangkan kelembagaan lokal pengelolaan sumberdaya air yang mampu mengembangkan konsep gotong royong dalam pengelolaan sumber daya air terutama yang terkait dengan irigasi; meningkatkan upaya konservasi sumberdaya air melalui pelestarian sumber air; peningkatan pengawasan atas pengambilan air dan penggunaannya agar tetap mempertimbangkan kepentingan konservasi; menerapkan



sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong upaya konservasi sumberdaya air; meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah air; mendorong upaya pelestarian daerah resapan air antara lain melalui penerapan ketentuan penggunaan lahan sesuai peruntukannya; dan mengupayakan keterpaduan rencana tata ruang dengan potensi dan pengembangan sumberdaya air; memperbaiki pola pendayagunaan sumberdaya air; meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air; serta meningkatkan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolaan sumberdaya air.

3. Pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk menjadi wahana yang dapat diandalkan guna terselenggaranya arus berita, informasi, dan data baik lokal, regional, nasional, maupun internasional secara lancar, jelas, dan cepat untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi.
4. Pembangunan telematika diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan telematika bagi peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan.
5. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan keandalannya untuk meningkatkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga yang memadai dan mampu menjamin kualitas pelayanan untuk mendukung kegiatan investasi; serta mendorong diversifikasi energi untuk pembangkit listrik.
6. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung secara memadai bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan yang didukung dengan kebijakan dan program penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
7. Penataan kawasan perkotaan diarahkan untuk menciptakan suasana kota yang tertib, bersih, sehat, indah dan nyaman



melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan ruang publik.

8. Pengembangan wilayah khususnya wilayah-wilayah tertinggal diarahkan untuk meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dalam rangka mengurangi disparitas kesejahteraan penduduk dan perkembangan antar wilayah khususnya antara wilayah perdesaan dan perkotaan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
9. Pembangunan tata ruang diarahkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan lahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang yang ideal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan lahan dan ruang; mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup; mengurangi dampak negatif pemanfaatan ruang terhadap bidang sosial dan ekonomi; mendorong aktivitas sosial dan ekonomi; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Kerjasama antardaerah terutama dengan kabupaten tetangga perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam pendayagunaan dan pemasaran potensi daerah.

#### **IV.1.6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup sangat menentukan kualitas hidup manusia. Kondisi lingkungan hidup yang sehat akan memberikan kenyamanan sekaligus mampu mendukung kehidupan manusia dengan baik. Sebaliknya, kondisi lingkungan hidup yang kurang sehat atau rusak akan memberi pengaruh buruk dan menjadikan kehidupan manusia menjadi tidak nyaman.

Meskipun pada saat ini kondisi lingkungan hidup masih mampu mendukung kehidupan manusia, tetapi disadari bahwa kualitas lingkungan hidup terus mengalami penurunan, antara lain ditandai dengan gejala meningkatnya pemanasan global; terjadinya bencana alam yang silih berganti seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan; pergeseran



pola musim; meningkatnya permukaan air laut; menurunnya kekayaan plasma nutfah; berkembangnya berbagai jenis penyakit, baik yang menyerang manusia maupun tanaman dan hewan; dan sebagainya.

Terus meningkatnya jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya desakan terhadap lingkungan hidup akibat eksploitasi yang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berbagai aktivitas manusia akan menimbulkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang terlanjur mengalami degradasi sangat sulit dikembalikan agar kondisi dan fungsinya dapat pulih seperti sedia kala. Selain itu, dibutuhkan nilai investasi yang sangat besar yang mungkin melampaui nilai yang diambil dari hasil eksploitasi sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, upaya yang paling tepat dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah melalui pemeliharaan serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Hal itu dapat dilaksanakan secara efektif apabila seluruh komponen masyarakat dan pemerintah telah memiliki kesadaran tentang arti penting pelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah. Untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang terlanjur mengalami kerusakan, harus dilakukan upaya rehabilitasi.

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dalam kurun waktu 20 tahun ke depan meliputi :

1. Perbaikan pendayagunaan SDA terbarukan seperti hutan, pertanian (tanaman), peternakan (hewan ternak), dan perairan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.
2. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup serta pengembangan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; serta perluasan penerapan etika lingkungan



agar lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan.

3. Perbaiki pengelolaan SDA tak terbarukan melalui pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, mineral dan sebagainya sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup maupun dampak langsung yang merugikan bagi kepentingan kehidupan manusia.
4. Perbaiki pengelolaan sumber daya air untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.

#### **IV.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025**

##### **IV.3.1 RPJMD I (Tahun 2005-2009)**

Dalam RPJMD I, pembangunan Kabupaten Purbalingga ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar; pembangunan fondasi perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang ditunjang oleh penyediaan berbagai prasarana sosial ekonomi yang vital bagi peningkatan aksesibilitas dan mobilitas sosial ekonomi masyarakat; serta peletakan dasar-dasar penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

##### **IV.3.1.1 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**

1. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan fungsi pengawasan melekat melalui peningkatan pembinaan administrasi.
2. Peningkatan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi.



3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur.
4. Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundangan dan kebutuhan.
5. Penataan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan memadukan perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas.
6. Pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta kelembagaan masyarakat.
7. Pengembangan jejaring kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antardaerah dalam rangka meningkatkan akses sumber daya bagi akselerasi pembangunan; peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan dalam pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya pembangunan dan potensi daerah.

#### **IV.3.1.2 Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berdasarkan Hukum**

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum melalui penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum.
2. Penanaman dan pengembangan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum melalui pendidikan formal, non formal, dan informal.
3. Penumbuhan kesadaran politik rakyat dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis.



4. Peningkatan peran dan fungsi lembaga politik melalui fasilitasi lembaga-lembaga politik.

#### **IV.3.1.3 Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme**

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui peningkatan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai SPM serta pengarusutamaan gender.
2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Fasilitasi penelitian dan pengembangan IPTEK terutama yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendorong laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
4. Pembinaan kepemudaan keolahragaan melalui fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
5. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada upaya untuk menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
6. Peningkatan penanganan PMKS dengan menitikberatkan pada identifikasi, pendataan, dan updating data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan upaya penanganan PMKS.
7. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan keluarga



- dengan menitikberatkan pada peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.
8. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberatkan pada stimulasi prakarsa, swadaya dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui pengembangan dan peningkatan efektifitas upaya pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta pengembangan dan revitalisasi kelembagaan masyarakat.
  9. Pengarusutamaan gender dan hak-hak anak dalam rangka mendorong keadilan gender dan perlindungan anak.
  10. Penanggulangan kemiskinan melalui upaya pemenuhan kebutuhan hidup pokok masyarakat dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar.
  11. Fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunan hidup beragama.
  12. Fasilitasi dan stimulasi kegiatan dan lembaga seni budaya, pengembangan budaya membaca dan menulis melalui pengembangan perpustakaan serta pengembangan budaya produktif melalui pendidikan kewirausahaan.
  13. Pengembangan semangat kebangsaan melalui peringatan hari-hari besar nasional dan internalisasi nilai-nilai nasionalisme.

#### **IV.3.1.4 Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan**

1. Penumbuhan potensi dan peningkatan produktivitas UMKM berbasis potensi lokal dan berorientasi pasar.
2. Menumbuhkembangkan koperasi dan lembaga keuangan masyarakat untuk mendorong perekonomian rakyat.



3. Pengembangan industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menitikberatkan pada industri padat karya, memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dan ramah lingkungan.
4. Penciptaan lingkungan bisnis (business environment) yang kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi dengan menitikberatkan pada kemudahan pelayanan perizinan, peningkatan penyediaan infrastruktur penunjang, kemudahan akses terhadap lahan usaha serta kepastian usaha.
5. Menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta meningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan peran usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah antara lain melalui modernisasi pasar tradisional dan fasilitasi pedagang kecil.
6. Penumbuhan dan pengembangan potensi wisata inovatif yang memiliki nilai jual dalam upaya untuk mewujudkan peran pariwisata sebagai primemover perekonomian daerah.
7. Peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja serta perlindungan tenaga kerja.
8. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan) dengan fokus peningkatan sarana prasarana dan pelayanan penyaluran sarana produksi untuk meletakkan fondasi yang kokoh dalam rangka pengembangan agribisnis.
9. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat.
10. Pengembangan lembaga keuangan bank dan non bank di seluruh wilayah serta fasilitasi akses modal bagi usaha ekonomi rakyat.

#### **IV.3.1.5 Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah**



1. Peningkatan penyediaan infrastruktur perhubungan yang memadai dan terintegrasi guna mendukung pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Peningkatan tata kelola transportasi lokal dengan menitikberatkan pada peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sarana prasarana transportasi.
3. Pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta pengembangan kelembagaan pengelolaan air.
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informatika (TI) dalam berbagai sektor dengan menitikberatkan pada pemasyarakatan pemanfaatan TI dan pengembangan infrastruktur TI.
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik.
6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat yang didukung dengan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembayaran perumahan jangka panjang antara lain melalui kerjasama dengan swasta.
7. Peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman.
8. Penataan kawasan perkotaan dan penyediaan prasarana pelayanan umum dan ruang publik untuk mewujudkan kota yang mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman.
9. Pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dan wilayah-wilayah strategis serta wilayah perbatasan untuk meningkatkan sinergi perkembangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.



10. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang
11. Pembentukan dan pengembangan lembaga kerjasama antar daerah dalam rangka perencanaan dan sinergi pembangunan serta pendayagunaan dan pemasaran potensi daerah.

#### **IV.3.1.6 Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

1. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis secara terpadu berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
2. Inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka pengembangan basis data dan informasi lingkungan.
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan stakeholders terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan.
4. Pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air yang meliputi pemeliharaan mata air, daerah tangkapan air dan aliran sungai.

#### **IV.3.2 RPJMD II (Tahun 2010-2014)**

Dalam RPJMD II, pembangunan Kabupaten Purbalingga ditekankan pada upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang semakin berkualitas, memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang ditunjang penyediaan berbagai prasarana sosial ekonomi yang semakin meningkat kapasitas dan kualitasnya, serta



mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **IV.3.2.1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**

1. Penguatan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekat melalui pengembangan sistem pembinaan administrasi dan peningkatan kompetensi aparatur.
2. Penguatan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
3. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur sesuai bidang tugas dan peningkatan disiplin aparatur dengan penerapan *reward and punishment*.
4. Penyesuaian kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, kualitas sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan pembangunan.
6. Perluasan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta kelembagaan masyarakat.
7. Peningkatan kualitas dan efektivitas kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan akses sumberdaya bagi akselerasi pembangunan serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya pembangunan dan potensi daerah.

#### **IV.3.2.2. Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berdasarkan Hukum**



1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui peningkatan kualitas fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum.
2. Peningkatan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum melalui peningkatan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dalam pendidikan formal, non formal, dan informal.
3. Peningkatan kesadaran politik rakyat dalam rangka peningkatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum.
4. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga politik melalui peningkatan fasilitasi lembaga-lembaga politik dan fasilitasi akses rakyat terhadap pengambilan kebijakan politik.

#### **IV.3.2.3. Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme**

1. Melanjutkan upaya peningkatan IPM dan IPG dengan menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kapasitas dan kualitas upaya kesehatan keluarga serta kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan, serta peningkatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan.
2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada upaya untuk menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Peningkatan fasilitasi penelitian dan pengembangan IPTEK terutama yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendorong laju



pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

4. Peningkatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan pembinaan mental, kesehatan jasmanai dan peningkatan prestasi olahraga.
5. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas upaya kesehatan keluarga serta kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan.
6. Peningkatan Penanganan PMKS dengan menitik beratkan pada pengembangan sistem identifikasi, pendataan, dan updating data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta sistem penanganan PMKS.
7. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan upaya pemberdayaan keluarga.
8. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan prakarsa, swadaya dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui inovasi upaya pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan masyarakat.
9. Peningkatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan serta perlindungan anak melalui kebijakan pembangunan yang peka gender dan hak-hak anak.



10. Peningkatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup pokok masyarakat dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar.
11. Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasaranan pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunan hidup beragama.
12. Peningkatan internalisasi nilai-nilai luhur budaya melalui pendidikan formal, non formal, dan informal, peningkatan pengembangan seni budaya, budaya membaca dan menulis serta budaya produktif.
13. Peningkatan wawasan dan semangat kebangsaan melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan formal, non formal, dan informal secara sistematis dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal.

#### **IV.3.2.4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan**

1. Peningkatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produk.
2. Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen.
3. Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan industri padat karya, memanfaatkan potensi sumberdaya lokal, memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk semakin memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
4. Penciptaan lingkungan bisnis (*business environment*) yang semakin kondusif untuk



meningkatkan kegiatan usaha dan investasi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sistem pelayanan perizinan, peningkatan penyediaan dan kualitas infrastruktur penunjang, kemudahan akses terhadap lahan usaha serta kepastian usaha.

5. Menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta meningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan peran usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional dan fasilitasi pedagang kecil.
6. Peningkatan kapasitas, kualitas dan promosi obyek-obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan sehingga akan semakin meningkatkan perannya sebagai *primemover* perekonomian daerah.
7. Peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja dan peningkatan hubungan industrial.
8. Pengembangan agribisnis dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan inovasi serta penyerapan teknologi agar mampu meningkatkan kuantitas, kualitas dan daya saing produk.
9. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang aman dan terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat
10. Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank serta terutama lembaga keuangan masyarakat (LKM) guna semakin meningkatkan akses modal bagi usaha ekonomi rakyat.



8. Melanjutkan penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta peningkatan penyediaan prasarana pelayanan umum dan ruang publik untuk mewujudkan kota yang semakin mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman.
9. Peningkatan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal serta wilayah perbatasan untuk semakin meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.
10. Melakukan *review* dan melengkapi dokumen perencanaan penataan ruang serta melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang.
11. Revitalisasi lembaga kerjasama antar daerah untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pendayagunaan dan pemasaran potensi daerah.

#### **IV.3.2.6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

1. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
2. Peningkatan inventarisasi dan identifikasi serta pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya genetik.
3. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan teknologi ramah lingkungan



berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.

4. Peningkatan pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui optimalisasi pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air, dan aliran sungai.

#### **IV.3.3 RPJMD III (Tahun 2015-2019)**

RPJMD III sebagai kelanjutan dan hasil dari pelaksanaan RPJMD I dan RPJMD II dilaksanakan untuk semakin memantapkan pembangunan secara keseluruhan yang ditandai dengan semakin mantapnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan dan papan yang layak bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan menengah yang semakin berkualitas; tersedianya infrastruktur sosial ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai; terciptanya kehidupan sosial dan politik yang semakin harmonis dan dinamis; serta kehidupan ekonomi yang tumbuh secara dinamis yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat dalam proses produksi dan pendapatan per kapita yang semakin baik dan merata.

##### **IV.3.3.1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**

1. Pemantapan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi administrasi pemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekat melalui penguatan sistem pembinaan administrasi dan penguatan kompetensi aparatur.
2. Pemantapan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya mendekati kebutuhan ideal.



#### **IV.3.2.5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah**

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan terutama di wilayah perdesaan guna mewujudkan keserasian pertumbuhan antar wilayah dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi di seluruh wilayah.
2. Peningkatan tata kelola transportasi lokal dengan menitikberatkan pada revitalisasi prasarana dan sarana transportasi, pengembangan kemampuan transportasi serta pengembangan jaringan transportasi regional melalui fasilitasi pengembangan moda transportasi udara.
3. Peningkatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan air.
4. Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informatika (TI) dalam berbagai sektor dengan menitikberatkan pengembangan infrastruktur TI hingga ke wilayah perdesaan.
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik serta pengembangan pembangkit listrik alternatif.
6. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembayaran perumahan jangka panjang antara lain melalui kerjasama dengan swasta.
7. Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan mengurangi permukiman kumuh.



3. Penguatan profesionalisme aparatur antara lain dengan menitikberatkan pembinaan karir PNS berdasarkan *meryt system*.
4. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Penguatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
6. Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya masyarakat mandiri.
7. Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah.

#### **IV.3.3.2. Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berdasarkan Hukum**

1. Penguatan keamanan dan ketertiban umum melalui penguatan manajemen fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum.
2. Penguatan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum dengan semakin menguatkan penanaman dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dalam pendidikan formal, non formal, dan informal serta berbagai bidang kehidupan masyarakat.
3. Penguatan kesadaran dan peran politik rakyat dalam rangka penguatan dan pemeliharaan kualitas kehidupan politik melalui penguatan



budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum.

4. Penguatan peran dan fungsi lembaga politik serta penguatan kesadaran politik rakyat melalui peningkatan peran politik rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan politik.

#### **IV.3.3.3. Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme**

1. Melanjutkan upaya peningkatan IPM dan IPG melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Nasional (SN) dan menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan kualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, serta penguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan melalui penguatan kebijakan pembangunan yang peka gender.
2. Peningkatan, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Nasional (SN) dan menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK serta pengembangan hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
4. Penguatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan pembinaan



mental, kesehatan jasmani, dan peningkatan prestasi olahraga.

5. Peningkatan dan pemerataan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada penguatan kualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman.
6. Peningkatan penanganan PMKS dengan pengembangan sistem jaminan sosial.
7. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta penguatan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada penguatan kemandirian kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta penguatan kualitas keluarga.
8. Penguatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberatkan pada penguatan prakarsa, swadaya dan peranserta masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan inovasi upaya pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan masyarakat.
9. Penguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan serta perlindungan anak melalui penguatan kebijakan pembangunan yang peka gender dan hak-hak anak serta pelembagaan perlindungan anak.
10. Penguatan penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat.
11. Penguatan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunan hidup beragama.
12. Penguatan internalisasi nilai-nilai luhur budaya melalui pendidikan formal, non formal, dan informal, peningkatan pengembangan seni



budaya, budaya membaca dan menulis serta budaya produktif.

13. Penguatan wawasan dan semangat kebangsaan melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan formal, non formal, dan informal secara sistematis dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal.

#### **IV.3.3.4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan**

1. Penguatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui pemanfaatan Litbang dalam peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta pemanfaatan teknologi informasi.
2. Penguatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen.
3. Penguatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis teknologi dan penumbuhan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi, ramah lingkungan, serta berperan besar dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.
4. Penguatan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utama investasi dengan memantapkan kondusivitas lingkungan bisnis .
5. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta memperkuat usaha perdagangan yang menjadi katalisator perekonomian daerah untuk memantapkan perdagangan skala regional.
6. Penguatan kapasitas dan kualitas obyek-obyek wisata untuk menjadikan Purbalingga sebagai daerah tujuan wisata utama regional.



7. Peningkatan keterampilan dan kualitas serta peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja dan pelebagaan hubungan industrial yang harmonis.
8. Pengembangan agribisnis melalui peningkatan efisiensi, modernisasi, dan *value creation* usaha pertanian dalam arti luas.
9. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang aman, berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
10. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga keuangan di seluruh wilayah guna menguatkan akses modal bagi kegiatan usaha seluruh masyarakat.

#### **IV.3.3.5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah**

1. Melanjutkan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perhubungan yang semakin mendorong pembangunan sosial ekonomi diseluruh wilayah.
2. Peningkatan tata kelola transportasi lokal dengan menitikberatkan pada pengembangan jaringan transportasi lokal, peningkatan kualitas manajemen transportasi dan melanjutkan pengembangan moda transportasi udara.
3. Penguatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta penguatan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan air.
4. Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informatika dalam berbagai sektor melalui penyempurnaan regulasi dan pengembangan infrastruktur TI hingga ke wilayah terpencil.



5. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik serta pengembangan pembangkit listrik alternatif.
6. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembayaran perumahan jangka panjang antara lain melalui kerjasama dengan swasta serta penyediaan cadangan lahan untuk permukiman.
7. Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan semakin mengurangi permukiman kumuh.
8. Optimalisasi penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas prasarana pelayanan umum dan ruang publik untuk mewujudkan kota yang semakin mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman.
9. Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi untuk semakin meningkatkan perkembangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.
10. *Review* terhadap dokumen perencanaan penataan ruang yang sudah kadaluarsa dan melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang.
11. Penguatan lembaga kerjasama antar daerah dalam rangka penguatan peran dan fungsinya dalam sinergi perencanaan dan pelaksanaan



pembangunan serta pendayagunaan dan pemasaran potensi daerah.

#### **IV.3.3.6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

1. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya alam.
2. Melanjutkan pelestarian dan pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.
4. Penguatan pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Penguatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui penguatan kelembagaan dan sistem pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan aliran sungai.

#### **IV.3.4 RPJMD IV (Tahun 2020-2024)**

RPJMD IV sebagai kelanjutan dan hasil dari pelaksanaan RPJMD I, RPJMD II, dan RPJMD III dilaksanakan untuk semakin memantapkan pembangunan secara keseluruhan yang ditandai dengan semakin mantapnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan dan papan yang layak bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan menengah yang



semakin berkualitas; tersedianya infrastruktur sosial ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai; terciptanya kehidupan sosial dan politik yang semakin harmonis dan dinamis; serta kehidupan ekonomi yang tumbuh secara dinamis dengan partisipasi seluruh masyarakat dalam proses produksi dan pendapatan per kapita yang semakin baik dan merata.

#### **IV.3.4.1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**

1. Terwujudnya administrasi Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dengan terwujudnya fungsi pengawasan melekat yang optimal melalui pemantapan sistem pembinaan administrasi dan pemantapan kompetensi aparatur.
2. Terwujudnya pengawasan fungsional yang efektif melalui ketercukupan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan ideal.
3. Pemantapan profesionalisme aparatur menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).
4. Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemantapan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dengan memantapkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
6. Pemantapan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat mandiri.
7. Pemantapan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin mantapnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan dan pemasaran potensi daerah.



#### **IV.3.4.2. Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berdasarkan Hukum**

1. Pemantapan keamanan dan ketertiban umum melalui pemantapan manajemen fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum.
2. Pemantapan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum dalam berbagai bidang kehidupan melalui pemantapan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dalam pendidikan formal non formal dan informal.
3. Pemantapan kesadaran dan peran politik rakyat dalam rangka pemantapan dan pemeliharaan kualitas kehidupan politik melalui penguatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum.
4. Pemantapan peran dan fungsi lembaga politik serta penguatan kesadaran politik rakyat melalui penguatan peran politik rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan politik.

#### **IV.3.4.3. Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme**

1. Melanjutkan upaya peningkatan IPM dan IPG dengan mewujudkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat, menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pemantapan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan.
2. Terwujudnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah yang berkualitas.
3. Pemantapan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK serta pengembangan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

4. Pemantapan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan pembinaan mental, kesehatan jasmanai dan peningkatan prestasi olahraga.
5. Terjaminnya akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menitikberatkan pada pemantapan kualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta pemantapan kualitas lingkungan pemukiman dan penguatan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.
6. Terwujudnya jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
7. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta pemantapan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada pemantapan kemandirian kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta pemantapan kualitas keluarga.
8. Pemantapan prakarsa, swadaya, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang.
9. Pemantapan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan serta perlindungan anak.
10. Pemantapan penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi sistem jaminan sosial masyarakat.
11. Pemantapan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunan hidup beragama.
12. Pemantapan internalisasi nilai-nilai luhur budaya melalui pendidikan formal, non formal, dan informal, peningkatan pengembangan seni budaya, budaya membaca dan menulis serta budaya produktif.



13. Pemantapan wawasan dan semangat kebangsaan melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan formal, non formal, dan informal secara sistematis dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal.

#### **IV.3.4.4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan**

1. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.
2. Pemantapan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai lokomotif ekonomi rakyat.
3. Pemantapan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan peran industri berbasis teknologi dan industri kreatif yang ramah lingkungan serta berperan besar dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.
4. Pemantapan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utama investasi dengan semakin memantapkan lingkungan bisnis.
5. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta memantapkan usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah.
6. Pemantapan kapasitas dan kualitas obyek-obyek wisata untuk memantapkan Purbalingga sebagai daerah tujuan wisata utama regional.
7. Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja dan mewujudkan kemandirian tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis.
8. Pemantapan Purbalingga sebagai pusat agribisnis di kawasan regional.



9. Pemantapan ketahanan pangan yang aman, terjangkau, berkualitas serta halal.
10. Pemantapan kapasitas dan kualitas lembaga-lembaga keuangan guna menjamin akses modal bagi kegiatan usaha seluruh masyarakat.

#### **IV.3.4.5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah**

1. Pemantapan kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan di seluruh wilayah.
2. Pemantapan sistem transportasi lokal dan moda transportasi udara.
3. Pemantapan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta pemantapan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan air.
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informatika (TI) secara optimal dalam berbagai sektor kehidupan dengan jangkauan menyeluruh dan terpadu.
5. Pemantapan pemenuhan kebutuhan energi listrik.
6. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembayaran perumahan jangka panjang antara lain melalui kerjasama dengan swasta serta penyediaan cadangan lahan untuk permukiman.
7. Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan merevitalisasi permukiman kumuh.



8. Pemantapan penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta prasarana pelayanan umum dan ruang publik untuk memantapkan kota yang mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman.
9. Peningkatan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk semakin mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi untuk semakin meningkatkan perkembangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.
10. Melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang.
11. Pemantapan lembaga kerjasama antar daerah dalam rangka pemantapan peran dan fungsinya dalam sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pendayagunaan dan pemasaran potensi daerah.

#### **IV.3.4.6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

1. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsinya dalam menopang kehidupan.
2. Pemantapan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetis berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan.



4. Pemantapan pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Pemantapan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui pemantapan kelembagaan dan sistem pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan aliran sungai.



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, pihak-pihak yang terkait, dan masyarakat pada umumnya dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, RPJP ini harus menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Purbalingga, serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025. Apabila semua pihak terkait mengimplementasikan dokumen RPJP ini secara konsisten dalam dokumen perencanaan turunannya sampai ke tingkat paling rendah, diharapkan setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan akan memiliki benang merah dengan Visi Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian, selama kurun waktu 20 tahun ke depan diharapkan visi tersebut akan dapat diwujudkan.

RPJP Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 ini memuat garis-garis besar sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang harus ditempuh selama kurun waktu 20 tahun ke depan agar dapat diwujudkan kondisi ideal daerah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Purbalingga yaitu **PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA**. Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, maka selama kurun waktu berlakunya dimungkinkan terjadi berbagai perubahan kondisi lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, akibat dinamika dan perubahan kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya perubahan atau penyesuaian dokumen perencanaan ini dalam rangka antisipasi atau merespons berbagai kemungkinan perubahan tersebut.

Adanya kecenderungan terus berkembangnya kebutuhan dan permasalahan yang harus dihadapi pemerintah antara lain akibat terus meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya standar kehidupan masyarakat, menyebabkan meningkatnya beban belanja pemerintah. Oleh karena itu, peranserta dan dukungan masyarakat dan semua pihak terkait yang



peduli terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sangat dibutuhkan agar setiap arah kebijakan dan sasaran yang termuat dalam dokumen perencanaan ini dapat dilaksanakan dan dicapai. Dengan demikian, secara bertahap akan dapat diwujudkan kondisi ideal sesuai Visi Kabupaten Purbalingga.

**DISETUJUI**

Dengan Keputusan DPRD Kabupaten  
Purbalingga  
Nomor 170-03 Tahun 2009 Tanggal 29-6-2009  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Purbalingga  
Ketua,  
Cap, ttd  
T A S D I, SH

Purbalingga, 29 Juni 2009

**BUPATI PURBALINGGA**

Cap, ttd

**TRIYONO BUDI SASONGKO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga

Nomor : 01 Tanggal 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA



SUBENO



**Matrik Arah dan Tahapan  
RPJPD Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2005 - 2025**



# ARAH RPJP KABUPATEN PURBALINGGA 2005-2025

MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 -2009	Tahap II RPJM 2010 - 2014	Tahap III RPJM 2015 - 2020	Tahap IV RPJM 2020 - 2025
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, melalui :				
	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan cara meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur melalui koordinasi dan sinergi pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, produktif, dan bertanggung jawab;	Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan fungsi pengawasan melekat melalui peningkatan pembinaan administrasi dan peningkatan kompetensi aparatur.	Penguatan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekat melalui pengembangan sistem pembinaan administrasi dan peningkatan kompetensi aparatur.	Pemantapan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi administrasi pemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekat melalui penguatan sistem pembinaan administrasi dan penguatan kompetensi aparatur.	Terwujudnya administrasi Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dengan terwujudnya fungsi pengawasan melekat yang optimal melalui pemantapan sistem pembinaan administrasi dan pemantapan kompetensi aparatur.
		Peningkatan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi.	Penguatan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.	Pemantapan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya mendekati kebutuhan ideal.	Terwujudnya pengawasan fungsional yang efektif melalui ketercukupan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan ideal.
	Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan, berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan; serta mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan penyelenggaraan pembangunan dengan mengembangkan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan perencanaan dari bawah, dan mengoptimalkan fungsi perencanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur .	Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur sesuai bidang tugas, peningkatan disiplin aparatur dengan penerapan reward and punishment.	Penguatan profesionalisme aparatur antara lain dengan menitikberatkan pembinaan karir PNS berdasarkan merit system.	Pemantapan profesionalisme aparatur menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).
		Pemantapan kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penyesuaian kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penguatan kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pemantapan kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009				Tahap II RPJM 2010 - 2014				Tahap III RPJM 2015 - 2020				Tahap IV RPJM 2020 - 2025			
		Penataan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan memadukan perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas.		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, kualitas sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan pembangunan.		Penguatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dengan memantapkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dengan memantapkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dengan memantapkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dengan memantapkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dengan memantapkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.	
		Pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta kelembagaan masyarakat.		Perluasan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta kelembagaan masyarakat.		Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya masyarakat mandiri.		Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya masyarakat mandiri.		Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya masyarakat mandiri.		Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya masyarakat mandiri.		Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya masyarakat mandiri.		Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya masyarakat mandiri.	
		Pengembangan jejaring kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antardaerah dalam rangka meningkatkan akses sumber daya bagi akselerasi pembangunan; peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan dalam pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan sumber daya pembangunan dan potensi daerah.		Peningkatan kualitas dan efektivitas kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan akses sumber daya bagi akselerasi pembangunan serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya pembangunan dan potensi daerah.		Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah.		Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah.		Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah.		Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah.		Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah.		Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah.	



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009				Tahap II RPJM 2010 - 2014				Tahap III RPJM 2015 - 2020				Tahap IV RPJM 2020 - 2025			
		Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum, melalui :				Peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui peningkatan kualitas fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum				Penguatan keamanan dan ketertiban umum melalui penguatan manajemen fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum				Pemantapan keamanan dan ketertiban umum melalui pemantapan manajemen fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum.			
Mewujudkan Purbalingga yang tertib, aman, damai, dan Demokratis Berlandaskan Hukum	Pengembangan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal serta melalui penyuluhan dan keteladanan dalam praktik kehidupan sehari-hari.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum melalui penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum				Peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui peningkatan kualitas fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum				Penguatan keamanan dan ketertiban umum melalui penguatan manajemen fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum				Pemantapan keamanan dan ketertiban umum melalui pemantapan manajemen fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum.			
	Pengembangan ketertiban umum dan peningkatan keamanan melalui upaya penegakan hukum, penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas umum dan pelayanan umum, serta peningkatan manajemen fasilitas pelayanan umum; penerbitan dan revisi produk hukum daerah sesuai dinamika sosial ekonomi dan tuntutan kebutuhan.	Penanaman dan pengembangan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum melalui pendidikan formal, non formal, dan informal.				Peningkatan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum melalui peningkatan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dalam pendidikan formal, non formal, dan informal.				Penguatan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum dalam berbagai bidang kehidupan melalui pemantapan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dalam pendidikan formal non formal dan informal.				Pemantapan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum dalam berbagai bidang kehidupan melalui pemantapan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dalam pendidikan formal non formal dan informal.			
	Pengembangan kehidupan politik yang diarahkan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik rakyat dan mengembangkan etika politik serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga politik; mengembangkan komunikasi politik antara pemerintah, kekuatan politik, dan masyarakat secara intens dan egaliter; memfasilitasi penyelenggaraan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil; mengembangkan tradisi demokrasi dan nilai-nilai demokrasi dalam segala jenjang dan aspek kehidupan; memfasilitasi lembaga-lembaga politik agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.	Penumbuhan kesadaran politik rakyat dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis.				Peningkatan kesadaran politik rakyat dalam rangka peningkatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum.				Penguatan kesadaran dan peran politik rakyat dalam rangka penguatan dan pemeliharaan kualitas kehidupan politik melalui penguatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum.				Pemantapan kesadaran dan peran politik rakyat dalam rangka pemantapan dan pemeliharaan kualitas kehidupan politik melalui penguatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum.			
		Peningkatan peran dan fungsi lembaga politik melalui fasilitasi lembaga-lembaga politik.				Optimalisasi peran dan fungsi lembaga politik melalui peningkatan fasilitasi lembaga-lembaga politik dan fasilitasi akses rakyat terhadap pengambilan kebijakan politik.				Penguatan peran dan fungsi lembaga politik serta penguatan kesadaran politik rakyat melalui peningkatan peran politik rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan politik.				Pemantapan peran dan fungsi lembaga politik serta penguatan kesadaran politik rakyat melalui penguatan peran politik rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan politik.			



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009				Tahap II RPJM 2010 - 2014				Tahap III RPJM 2015 - 2020				Tahap IV RPJM 2020 - 2025			
		Mewujudkan Manusia Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Beretika, Memiliki Jati diri dan Semangat Nasionalisme serta Cinta Tanah Air , melalui :				Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui peningkatan akses pelayanan terhadap pelayan pendidikan dasar dan menengah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kapasitas dan kualitas upaya kesehatan keluarga serta kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan, serta peningkatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan.				Melanjutkan upaya peningkatan IPM dan IPG dengan mewujudkan pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Nasional (SN) dan menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan kualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, serta penguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan melalui penguatan kebijakan pembangunan yang peka gender.				Melanjutkan upaya peningkatan IPM dan IPG dengan mewujudkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat, menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pemantapan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan.			
Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Beretika, Memiliki Jati diri dan Semangat Nasionalisme serta Cinta Tanah Air .	Peningkatan kemampuan dan daya saing seluruh masyarakat Purbalingga termasuk kaum perempuan dalam era globalisasi agar mampu menyelenggarakan kehidupannya secara layak dan mandiri, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).	Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).				Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada upaya untuk menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).				Peningkatan, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Nasional (SN) dan menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).				Terwujudnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah yang berkualitas.			
	Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia Purbalingga sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi dengan tetap berlandaskan pada norma dan etika yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai universal kemanusiaan yang diselenggarakan secara efisien dan tanpa diskriminasi.	Fasilitasi penelitian dan pengembangan IPTEK terutama yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendorong laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.				Peningkatan fasilitas penelitian dan pengembangan IPTEK terutama yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendorong laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.				Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK serta sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.				Pemantapan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK serta peningkatan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.			
	Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan teknologi khususnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah.																



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 -2009				Tahap II RPJM 2010 - 2014				Tahap III RPJM 2015 - 2020				Tahap IV RPJM 2020 - 2025			
		Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan melalui fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.				Peningkatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan pembinaan mental, kesehatan jasmanial dan peningkatan prestasi olahraga.				Penguatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan pembinaan mental, kesehatan jasmanial dan peningkatan prestasi olahraga.				Pemantapan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan pembinaan mental, kesehatan jasmanial dan peningkatan prestasi olahraga.			
		Pembinaan yang intensif dan sistematis serta berkesinambungan, diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga sehingga dapat berbicara di tingkat regional maupun nasional, dan mengharumkan nama daerah, bahkan nama bangsa di dunia internasional.				Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.				Peningkatan dan pemerataan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada penguatan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman.				Terjaminnya akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menitikberatkan pada pemantapan kualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta pemantapan kualitas lingkungan pemukiman dan penguatan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.			
		Pembangunan kesehatan sosial diarahkan untuk meningkatkan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan bidang kehidupan lainnya; terjaminnya pemenuhan kebutuhan hidup pokok, bantuan sosial bagi korban bencana alam; serta meningkatkan mutu, manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial.				Peningkatan Penanganan PMKS dengan menitik beratkan pada pengembangan sistem identifikasi, pendataan, dan updating data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan upaya penanganan PMKS.				Peningkatan Penanganan PMKS dengan menitik beratkan pada pengembangan sistem identifikasi, pendataan, dan updating data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta sistem penanganan PMKS.				Terwujudnya jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).			



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009				Tahap II RPJM 2010 - 2014				Tahap III RPJM 2015 - 2020				Tahap IV RPJM 2020 - 2025			
		Peningkatan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.				Peningkatan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.				Peningkatan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.				Peningkatan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.			
MISI	Pembangunan Keluarga Berencana (KB) diarahkan dalam rangka mengendalikannya laju pertumbuhan penduduk dengan mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui peningkatan kepekaan KB serta peningkatan kemampuan dan kualitas keluarga.	Peningkatan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.				Peningkatan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.				Peningkatan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.				Peningkatan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.			
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat diarahkan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menemukan kebutuhan dan permasalahan serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi; mampu mengakses berbagai informasi dan sumberdaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya; dan mengetahui hak-haknya di bidang sosial dan ekonomi.	Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.				Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.				Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.				Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kepekaan Berencana (KB) serta pengembangan upaya pemberdayaan keluarga.			
MISI	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan serta meningkatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, memperkuat kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender dan anak, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di semua jenjang perencanaan pembangunan serta menyukseskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Pengarusutamaan gender dan hak-hak anak dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak.				Peningkatan kesetaraan gender dan hak-hak anak dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak.				Peningkatan kesetaraan gender dan hak-hak anak dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak.				Peningkatan kesetaraan gender dan hak-hak anak dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak.			
	Peningkatan kesetaraan gender dan hak-hak anak dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak.	Peningkatan kesetaraan gender dan hak-hak anak dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak.				Peningkatan kesetaraan gender dan hak-hak anak dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak.				Peningkatan kesetaraan gender dan hak-hak anak dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak.				Peningkatan kesetaraan gender dan hak-hak anak dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak.			



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009	Tahap II RPJM 2010 - 2014	Tahap III RPJM 2015 - 2020	Tahap IV RPJM 2020 - 2025
		<p>Penanggulangan kemiskinan diarahkan dalam rangka pencegahan pewarisan kemiskinan dari keluarga miskin kepada keturunannya, pencegahan timbulnya keluarga miskin baru, serta pengentasan keluarga miskin.</p> <p>Pembangunan moral dan keagamaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama sehingga dapat diwujudkan sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama.</p> <p>Pembangunan moral dan keagamaan juga diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etik dalam segala aspek kehidupan masyarakat serta untuk meningkatkan kerukunan hidup inter dan antarumat beragama. Untuk itu, diperlukan peningkatan pelayanan kehidupan beragama berupa penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan agama dan fasilitas peribadatan, serta peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial sekaligus sebagai penjaga moral masyarakat yang dinamis.</p>	<p>Peningkatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup pokok masyarakat dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar.</p> <p>Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunan hidup beragama.</p>	<p>Penguatan penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat.</p> <p>Penguatan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunan hidup beragama.</p>	<p>Pemantapan penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi sistem jaminan sosial masyarakat.</p> <p>Pemantapan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunan hidup beragama.</p>



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009	Tahap II RPJM 2010 - 2014	Tahap III RPJM 2015 - 2020	Tahap IV RPJM 2020 - 2025
	<p>Pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan seiring dengan pembangunan pendidikan diarahkan dalam rangka pelestarian dan internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas moral masyarakat, sekaligus sebagai penangkal penetrasi nilai budaya asing yang kurang menguntungkan bagi pembangunan produktif; pengembangan nilai budaya dan menulis; peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya; pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal yang bermanfaat untuk memperkuat jati diri bangsa serta membangun identitas dan kebanggaan terhadap daerah.</p>	<p>Facilitasi dan stimulasi kegiatan dan lembaga seni budaya, pengembangan budaya membaca dan menulis melalui pengembangan perpustakaan serta pengembangan budaya produktif melalui pendidikan kewirausahaan.</p>	<p>Peningkatan internalisasi nilai-nilai luhur budaya melalui pendidikan formal, non formal, dan informal, peningkatan pengembangan seni budaya, budaya membaca dan menulis serta budaya produktif.</p>	<p>Penguatan internalisasi nilai-nilai luhur budaya melalui pendidikan formal, non formal, dan informal, peningkatan pengembangan seni budaya, budaya membaca dan menulis serta budaya produktif.</p>	<p>Pemantapan internalisasi nilai-nilai luhur budaya melalui pendidikan formal, non formal, dan informal, peningkatan pengembangan seni budaya, budaya membaca dan menulis serta budaya produktif.</p>



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009				Tahap II RPJM 2010 - 2014				Tahap III RPJM 2015 - 2020				Tahap IV RPJM 2020 - 2025			
		Peningkatan wawasan dan semangat kebangsaan terutama diarahkan dalam rangka pengenalan pluralitas sosial, budaya, dan geografis Indonesia serta internalisasi nilai-nilai nasionalisme terutama bagi generasi muda dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal.				Peningkatan wawasan dan semangat kebangsaan melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal secara sistematis dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal.				Penguatan wawasan dan semangat kebangsaan melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal secara sistematis dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal.				Peningkatan wawasan dan semangat kebangsaan melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal secara sistematis dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal.			
<b>Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang semakin meningkat dan berkeadilan</b>	Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita riil masyarakat yang merata :	Peningkatan potensi dan peningkatan produktivitas UMKM berbasis potensi lokal dan berorientasi pasar.				Peningkatan daya saling kompetitif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produk.				Penguatan daya saling kompetitif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui pemanfaatan Litbang dalam peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta pemanfaatan teknologi informasi.				Peningkatan daya saling kompetitif dan kompetitif UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.			
	Menjadikan UMKM yang terintegrasi dan termodernisasi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi melalui peningkatan kompetensi, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan produktivitas yang didukung peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi, dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.	Menumbuhkembangkan koperasi dan lembaga keuangan masyarakat untuk mendorong perekonomian rakyat.				Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan meningkatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen.				Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen.				Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat.			
	Pemantapan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai lokomotif ekonomi rakyat sehingga dapat menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik selaku produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi.	Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan industri padat karya, memanfaatkan potensi sumberdaya lokal, dan memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk semakin memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.				Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi, ramah lingkungan, serta berperan besar dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.				Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi, ramah lingkungan, serta berperan besar dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.				Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi, ramah lingkungan, serta berperan besar dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.			
	Pemantapan peran industri sebagai industri yang berdaya saing baik di pasar regional, nasional maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta terkait dengan perekonomian daerah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk semakin memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.				Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk semakin memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.				Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan, serta berperan besar dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.				Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi, ramah lingkungan, serta berperan besar dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.			



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009				Tahap II RPJM 2010 - 2014				Tahap III RPJM 2015 - 2020				Tahap IV RPJM 2020 - 2025			
		Penciptaan lingkungan bisnis (business environment) yang kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi dengan menitikberatkan pada kemudahan pelayanan perizinan, peningkatan kualitas sistem pelayanan perizinan, peningkatan penyediaan infrastruktur penunjang, kemudahan akses terhadap lahan usaha serta kepastian usaha.				Penguatan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utama investasi dengan mempertahankan kondusivitas lingkungan bisnis.				Penguatan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utama investasi dengan mempertahankan kondusivitas lingkungan bisnis.				Penguatan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utama investasi dengan mempertahankan kondusivitas lingkungan bisnis.			
		Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta mempertahankan peran usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah melalui modernisasi manajemen pasar tradisional dan fasilitasi pedagang kecil.				Menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta meningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan peran usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah melalui modernisasi manajemen pasar tradisional dan fasilitasi pedagang kecil.				Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta memperkuat usaha perdagangan yang menjadi katalisator perekonomian daerah untuk mempertahankan perdagangan skala regional.				Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta mempertahankan usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah.			
		Peningkatan kapasitas, kualitas dan promosi obyek-obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan sehingga akan semakin meningkatkan perannya sebagai primemover perekonomian daerah.				Peningkatan kapasitas, kualitas dan promosi obyek-obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan sehingga akan semakin meningkatkan perannya sebagai primemover perekonomian daerah.				Peningkatan kapasitas dan kualitas obyek-obyek wisata untuk menjadikan Purbalingga sebagai daerah tujuan wisata utama regional.				Peningkatan kapasitas dan kualitas obyek-obyek wisata untuk mempertahankan Purbalingga sebagai daerah tujuan wisata utama regional.			
		Peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja dan peningkatan hubungan Industrial.				Peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja dan peningkatan hubungan Industrial.				Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja dan mewujudkan kemandirian tenaga kerja serta harmonis.				Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja dan mewujudkan kemandirian tenaga kerja serta hubungan Industrial yang harmonis.			
		Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan) dengan fokus peningkatan sarana prasarana dan pelayanan penyuluhan sarana produksi untuk meletakkan fondasi yang kokoh dalam rangka pengembangan agribisnis.				Pengembangan agribisnis dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan inovasi serta penyerapan teknologi agar mampu meningkatkan kuantitas, kualitas dan daya saling pertanian dan produk hasil pertanian.				Pengembangan agribisnis melalui peningkatan efisiensi, modernisasi, dan value creation usaha pertanian dalam arti luas.				Pengembangan agribisnis sebagai pusat agribisnis di kawasan regional.			



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009				Tahap II RPJM 2010 - 2014				Tahap III RPJM 2015 - 2020				Tahap IV RPJM 2020 - 2025			
		Peningkatan upaya ketercukupan dan pengankaragaman konsumsi pangan yang terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat.				Peningkatan upaya ketercukupan dan pengankaragaman konsumsi pangan yang aman dan terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat.				Peningkatan upaya ketercukupan dan pengankaragaman konsumsi pangan yang aman, terjangkau, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.				Pemantapan Ketahanan Pangan yang aman, terjangkau, berkualitas serta halal			
Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	Mejaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, terjangkau, berkualitas serta halal sesuai kaidah agama.	Peningkatan lembaga keuangan bank dan non bank di seluruh wilayah serta fasilitasi akses bagi usaha ekonomi rakyat.				Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank serta terutama lembaga keuangan masyarakat (LKM) guna semakin meningkatkan akses modal bagi usaha ekonomi rakyat.				Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga keuangan di seluruh wilayah guna menguatkan akses modal bagi kegiatan usaha seluruh masyarakat.				Pemantapan kapasitas dan kualitas lembaga-lembaga keuangan guna menjamin akses modal bagi kegiatan usaha seluruh masyarakat.			
	Mewujudkan kontribusi dalam penyediaan dana bagi pembiayaan pembangunan pada umumnya dan pembiayaan usaha pada khususnya, melalui pengembangan jaringan pelayanan jasa keuangan di seluruh wilayah terutama peningkatan kontribusi berbagai jenis lembaga jasa keuangan non-bank dalam pendanaan pembangunan dan pembiayaan usaha ekonomi rakyat.	Peningkatan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai dan terintegrasi guna mendukung pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi wilayah.				Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan perhubungan terutama di wilayah pedesaan guna mewujudkan keserasan pertumbuhan antar wilayah dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi disekeluruh wilayah.				Melanjutkan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang semakin mendorong pembangunan sosial ekonomi disekeluruh wilayah.				Pemantapan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah.			
Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	Pembangunan prasarana transportasi diarahkan untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan pergerakan orang serta distribusi barang dan jasa dalam rangka mendukung dan mendorong aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya dalam mendorong transaksi perdagangan dan proses produksi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana angkutan; peningkatan jaringan pelayanan sarana pendukung lalu lintas; peningkatan manajemen lalu lintas; serta dengan menciptakan dan menyelenggarakan regulasi sesuai kewenangan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa transportasi dan menyusun cetak biru Tata Transportasi Wilayah.	Peningkatan tata kelola transportasi lokal dengan menitikberatkan pada revitalisasi prasarana dan sarana transportasi, pengembangan kemampuan transportasi serta pengembangan jaringan transportasi reginol melalui fasilitasi pengembangan moda transportasi udara.				Peningkatan tata kelola transportasi lokal dengan menitikberatkan pada revitalisasi prasarana dan sarana transportasi, pengembangan kemampuan transportasi serta pengembangan jaringan transportasi reginol melalui fasilitasi pengembangan moda transportasi udara.				Peningkatan tata kelola transportasi lokal dengan menitikberatkan pada pengembangan jaringan transportasi lokal, peningkatan kualitas manajemen transportasi dan melanjutkan pengembangan moda transportasi udara.				Pemantapan sistem transportasi lokal dan moda transportasi udara.			



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009				Tahap II RPJM 2010 - 2014				Tahap III RPJM 2015 - 2020				Tahap IV RPJM 2020 - 2025			
		Pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengaliran melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta pengembangan kelembagaan pengelolaan air.				Peningkatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengaliran melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan air.				Penguatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengaliran melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta penguatan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan air.				Pemantapan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengaliran melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta pemantapan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan air.			
	Pembangunan sumberdaya air diarahkan untuk menjamin ketersediaan air, khususnya untuk kegiatan pertanian secara umum, yang menjamin ketahanan pangan; mengembangkan kelembagaan lokal pengelolaan sumberdaya air yang mampu mengembangkan konsep gotong royong dalam pengelolaan sumber daya air terutama yang terkait dengan irigasi; meningkatkan upaya konservasi sumberdaya air melalui pelestarian sumber air; peningkatan pengawasan atas pengambilan air dan penggunaannya agar tetap mempertimbangkan kepentingan konservasi; menerapkan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong upaya konservasi sumberdaya air; meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah air; mendorong upaya pelestarian daerah resapan air antara lain melalui penerapan ketentuan penggunaan lahan sesuai peruntukannya; dan mengupayakan keterpaduan rencana tata ruang dengan potensi dan pengembangan sumberdaya air; memperbaiki pola penyaluran sumberdaya air; meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air; serta meningkatkan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolaan sumberdaya air.	Peningkatan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan Informatika (TI) dalam berbagai sektor dengan penataan TI dan pengembangan infrastruktur TI.				Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan Informatika (TI) dalam berbagai sektor dengan menitikberatkan pengembangan infrastruktur TI hingga ke wilayah perdesaan.				Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan Informatika (TI) dalam berbagai sektor melalui penyempurnaan regulasi dan pengembangan infrastruktur TI hingga ke wilayah terpencil.				Peningkatan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan Informatika (TI) secara optimal dalam berbagai sektor kehidupan dengan jangkauan menyeluruh dan terpadu.			
	Pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk menjadi wahana yang dapat diandalkan guna terselenggaranya arus berita, informasi, dan data baik lokal, regional, nasional, maupun internasional secara lancar, jelas, dan cepat untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi.																
	Pembangunan telematika diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan telematika bagi peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan.																



MISI	Arah				Tahap I RPJM 2005 - 2009	Tahap II RPJM 2010 - 2014	Tahap III RPJM 2015 - 2020	Tahap IV RPJM 2020 - 2025
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan keandalannya untuk meningkatkan kemampuan pasokan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga yang memadai dan mampu menjamin kualitas pelayanan untuk mendukung kegiatan investasi; serta mendorong diversifikasi energi untuk pembangkit listrik.				Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik serta pengembangan pembangkit listrik alternatif.	Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik serta pengembangan pembangkit listrik alternatif.	Pemantapan pemenuhan kebutuhan energi listrik.
	Perencanaan pembangunan dan pemukiman diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung secara memadai bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan yang didukung dengan kebijakan dan program penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh;				Peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman melalui upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, air bersih dan sanitasi.	Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan kumuh melalui upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi.	Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan merevitalisasi permukiman kumuh melalui upaya pemenuhan rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi.	Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan merevitalisasi permukiman kumuh melalui upaya pemenuhan rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi.
	Penataan kawasan perkotaan diarahkan untuk menciptakan suasana kota yang tertib, bersih, sehat, indah dan nyaman melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan ruang publik.				Penataan kawasan perkotaan dan penyediaan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan kota yang mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi yang tertib, sehat, indah, dan nyaman.	Melanjutkan penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas penyediaan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan kota yang semakin mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi yang tertib, sehat, indah, dan nyaman.	Optimalisasi penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas fasilitas umum dan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan kota yang semakin mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi yang tertib, sehat, indah, dan nyaman.	Pemantapan penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta fasilitas umum dan rumah terbuka hijau untuk memantapkan kota yang mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman.
	Pengembangan wilayah khususnya wilayah-wilayah tertinggal diarahkan untuk meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dalam rangka mengurangi disparitas kesejahteraan penduduk dan perkembangan antar wilayah khususnya antara wilayah perdesaan dan perkotaan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh.				Pengembangan wilayah-wilayah tertinggal, dan wilayah-wilayah strategis serta wilayah perbatasan untuk meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.	Peningkatan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal serta wilayah perbatasan untuk semakin meningkatkan perkembangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.	Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi untuk semakin meningkatkan perkembangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.	Peningkatan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk semakin mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi untuk semakin meningkatkan perkembangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009				Tahap II RPJM 2010 - 2014				Tahap III RPJM 2015 - 2020				Tahap IV RPJM 2020 - 2025			
		Melakukan penataan ruang melalui penyusunan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.				Melakukan penataan ruang melalui review penyusunan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.				Melakukan penataan ruang melalui pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.				Melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang.			
Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Pembangunan tata ruang diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan lahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang yang ideal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan lahan dan ruang; mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup; mengurangi dampak negatif pemanfaatan ruang terhadap bidang sosial dan ekonomi; mendorong aktivitas sosial dan ekonomi; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis secara terpadu berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembalian fungsi kawasan lindung.				Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui peningkatan kelembagaan.				Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya.				Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.			
	Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, melalui :	Inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka pengembangan basis data dan informasi lingkungan.				Peningkatan inventarisasi dan identifikasi serta pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya genetik.				Melanjutkan pelestarian dan pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.				Pemantapan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
	Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup serta pengembangan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; serta perluasan penerapan etika lingkungan; agar lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan stakeholders terhadap fungsi lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan.				Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan stakeholders terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.				Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.				Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan.			



MISI	Arah	Tahap I RPJM 2005 - 2009	Tahap II RPJM 2010 - 2014	Tahap III RPJM 2015 - 2020	Tahap IV RPJM 2020 - 2025
	<p>Perbaikan pengelolaan SDA tak terbarukan melalui pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, mineral dan sebagainya sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup maupun dampak langsung yang merugikan bagi kepentingan kehidupan manusia.</p>	<p>Pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.</p>	<p>Peningkatan pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.</p>	<p>Penguatan pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.</p>	<p>Pemantapan pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.</p>
	<p>Perbaikan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.</p>	<p>Pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air yang meliputi pemeliharaan mata air, daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai.</p>	<p>Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui optimalisasi pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air, dan daerah aliran sungai.</p>	<p>Penguatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui penguatan kelembagaan dan sistem pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai.</p>	<p>Pemantapan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui pemantapan kelembagaan dan sistem pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai.</p>